

LAPORAN PP39

TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2025





BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang, Jawa Tengah 50136, Indonesia **T.** (024) 8316315, 8314312 **F.** (024)8414811 **HP.** 082134525006 **e.** bbspjppi.kemenperin@gmail.com





KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan III tahun 2025 Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan III Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tahun anggaran 2025 ini mencakup kegiatan yang dibiayai dari DIPA Tahun 2025 baik dari Rupiah Murni (RM) maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 September 2025. Dalam laporan ini juga memaparkan realisasi yang telah dicapai oleh Satker pada triwulan tersebut, serta pengawasan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian, laporan ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Kepada pihakpihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Semarang, Oktober 2025

Dr Sidik Herman





DAFTAR ISI

Kata Pe	ngantar
Daftar I	si
Bab. I	Pendahuluan
	1.1. Tugas Pokok dan Fungsi
	1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program
	1.3. Struktur Organisasi
Bab. II	Rencana Kegiatan
	2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025
	2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Bab. III	Pelaksanaan Kegiatan
	3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
	3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
	Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
	3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
	Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan
	3.1.3. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
	Berdasarkan Monitoring Rincian Output Bulanan
	3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
	3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
	3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan
	3.3. Langkah Tindak Lanjut
	3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
	3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan
Bab. IV	Penutup
	4.1. Realisasi Kegiatan
	4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
	4.3. Saran dan Tindak Lanjut
Lampira	an 1: Form Rencana Aksi
Lampira	an 2: Form Realisasi Rencana Aksi Triwulan III TA 2025
Lampira	an 3: Tabel Monitoring RO Juli-September 2025 (Aplikasi Smart Kemenkeu)
Lampira	an 4: APLIKASI EMONEV BAPPENAS TW III 2025



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis yang meliputi:

- a Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
 - Penanganan Pencemaran;
 - Pengujian Bahan dan Barang;
 - Standardisasi Pengujian Mutu Produk.
- b Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
- c Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
 - Sertifikasi Sistem Mutu
 - Sertifikasi Produk
 - Sertifikasi Industri Hijau
- d Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis
- e Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
 - Konsultasi Keteknikan
 - Rancang Bangun dan Rekayasa
- f Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri
 - Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai BMP
- g 🏻 Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal
- h Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi

Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010, BBSPJPPI telah menerapkan



Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

1.2. LATAR BELAKANG KEGIATAN /PROGRAM

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan tujuan organisasi dalam mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Selaras dengan tujuan BSKJI tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) menetapkan tujuan organisasi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Pada periode 2025-2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari kegiatan prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2025-2029, serta Kebijakan Industri Nasional 2025-2029, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada pelaksanaan:

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.



b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Dalam menjalankan Program/Kegiatan tahunan sebagai bagian tahapan dari pelaksanaan rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, guna mendukung capaian target dan sasaran strategis sekaligus dukungan atas pelaksanaan Tupoksi diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan Program/Kegiatan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan beserta kebutuhan penganggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan sekaligus sebagai dasar acuan untuk menilai capaian/ realisasi pelaksanaan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan di dalam dokumen Rencana Kinerja, telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target kinerja.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring kinerja dalam bentuk pelaporan kinerja yang memuat informasi capaian kinerja. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, disamping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program kegiatan yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala setingkat Eselon II , Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan kelompok

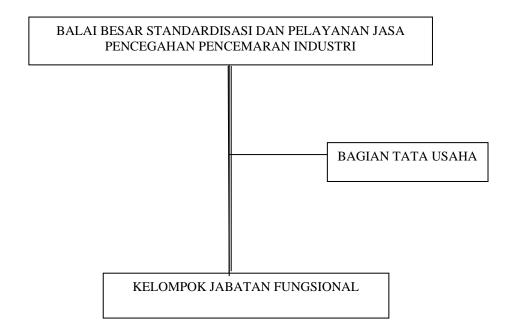


jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada kepala balai.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi BBSPJPPI

Dalam pelaksanaannya, pembagian fungsi koordinasi dalam kelompok jabatan fungsional disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis BBSPJPPI yang disesuaikan dan telah mengakomodir seluruh tugas dan fungsi BBSPJPPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun

LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2025



2022. Untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari masing-masing fungsi koordinasi tersebut ditunjuk seorang pejabat fungsional sebagai Ketua Tim Kerja.



BAB. II

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

2.1. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBSPJPPI 2025-2029, Visi BBSPJPPI adalah "Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing". Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBSPJPPI melaksanakan Misi "Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau". Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, kedepannya BBSPJPPI akan berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.



Pada tahun 2025 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada:

- 1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri Diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementrian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- Program Dukungan Manajemen
 BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal.

Terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI pada 2025 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 36.159.131.000,-. Dalam perjalanannya, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan maupun perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran di tingkat internal BBSPJPPI, telah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 pada 17 Januari 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.
- b. Revisi ke-2 pada 21 Februari 2025, revisi dalam rangka efisiensi anggaran BBSPJPPI Tahun 2025. Nilai efisiensi belanja BBSPJPPI TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam nota dinas BSKJI sebesar Rp 6.589.339.000 yang terdiri dari efisiensi belanja sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 1.917.839.000 dan Sumber PNBP/BLU sebesar Rp 4.617.500.000. Pagu efektif BBSPJPPI Tahun 2025 sebesar Rp 29.569.792.000. Revisi ini tanpa merubah pagu.
- c. Revisi ke-3 pada 3 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi rekomposisi revisi efisiensi anggaran. Pagu anggaran tidak mengalami perubahan



- d. Revisi ke-4 pada 11 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi pencantuman saldo awal.
 - Besaran saldo awal BLU BBSPJPPI TA 2025 sebesar Rp. 2.937.097.225,- sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Semarang I Nomor KET-3/KPN. 1401/2025 tanggal 10 Februari 2025. Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan.
- e. Revisi ke-5 pada 17 April 2025, dengan pertimbangan revisi adalah pemutakhiran RPD Hal III DIPA.
 - Untuk mendukung pencapaian kinerja IKPA yang optimal khususnya pada aspek perencanaan, telah dilakukan pengajuan revisi dalam rangka penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada satker BBSPJPPI sd Triwulan III 2025.
 - Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan.
- f. Revisi ke-6 pada 27 Mei 2025, dengan pertimbangan revisi adalah relaksasi Blokir Kode A.
 - Besaran relaksasi blokir kode A sebesar Rp. 175.815.000,- yang ditujukan untuk kegiatan layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor). Relaksasi ini menyebabkan nilai efisiensi belanja yang semula Rp. 6.589.339.000,- menjadi sebesar Rp. 6.413.524.000,-, sehingga besaran pagu efektif BBSPJPPI TA 2025 menjadi sebesar Rp. 29.745.607.000,-
- g. Revisi ke-7 pada 25 Juni 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.
- h. Revisi ke-8 pada 7 Juli 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran RPD halaman III DIPA Triwulan III tanpa merubah pagu.
- i. Revisi ke-9 pada 22 Agustus 2025, revisi dalam rangka relaksasi blokir anggaran BBSPJPPI Tahap II. Dimana BBSPJPPI mendapatkan relaksasi blokir kode A tahap II sebesar Rp. 591.306.000,- yang ditujukan untuk kegiatan layanan kepada industri dan perjalanan dinas pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Pagu efektif anggaran menjadi Rp.30.336.913.000,-
- j. Revisi ke-10 pada 19 September 2025, revisi dalam rangka penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp.2.788.144.000,-. Revisi menyebabkan penambahan pagu anggaran pada DIPA BBSPJPPI menjadi sebesar Rp. 38.947.275.000,dengan nilai pagu efektif anggaran sebesar Rp. 33.125.057.000,-.



Tabel 1 Pagu Anggaran Program BBSPJPPI 2025

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran 2025
Anggaran BBSPJPPI	38.947.275.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	15.448.050.000
Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	15.448.050.000
KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000
KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri	11.543.743.000
KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000
Program Dukungan Manajemen	23.499.225.000
2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	23.499.225.000
KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000
KRO 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000
KRO 3 : Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000
KRO 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000

Berdasarkan persetujuan dan pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 tersebut, maka Program/Kegiatan berikut besaran pagu anggaran BBSPJPPI Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel. 2 berikut :

Tabel 2. Program/Kegiatan BBSPJPPI Tahun Anggaran 2025

Program /	Pagu Anggaran Triwulan III				
Kegiatan / KRO	Anggaran awal	Blokir	Pemanfaatan	Efektif	
			Saldo Kas BLU		
Anggaran BBSPJPPI	36.159.131.000	5.822.218.000	2.788.144.000	33.125.057.000	
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	12.659.906.000	2.734.340.000	2.788.144.000	12.713.710.000	
1. Kegiatan : Pengembangan dan	12.659.906.000	2.734.340.000	2.788.144.000	12.713.710.000	

LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2025



Program /		Pagu Anggar	an Triwulan III	
Kegiatan / KRO	Anggaran awal	Blokir	Pemanfaatan Saldo Kas BLU	Efektif
Penyelenggaraan Jasa Industri				
KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000	227.537.000	0	329.675.000
KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri	8.755.599.000	913.278.000	2.788.144.000	10.630.465.000
KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000	1.593.525.000	0	1.753.570.000
Program Dukungan Manajemen	23.499.225.000	3.087.878.000	0	20.411.347.000
2.Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	23.499.225.000	3.087.878.000	0	20.411.347.000
KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000	1.472.024.000	0	19.600.120.000
KRO 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000	1.273.091.000	0	201.735.000
KRO 3 : Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000	294.006.000	0	406.518.000
KRO 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000	48.757.000	0	202.974.000



Tabel 3. Klasifikasi Rincian Output dan Anggaran BBSPJPPI Tahun 2025

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran Awal (Rp)	Blokir (Rp)	Pemanfaatan Saldo Kas BLU (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000	227.537.000	(329.675.000
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	8.755.599.000	913.278.000	2.788.144.000	10.630.465.000
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000	1.593.525.000		1.753.570.000
4	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000	1.472.024.000		19.600.120.000
5	6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000	1.273.091.000		201.735.000
6	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000	294.006.000		406.518.000
7	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000	48.757.000		202.974.000
		Total	36.159.131.000	5.822.218.000	2.788.144.000	33.125.057.000

Secara rinci rencana anggaran BBSPJPPI Tahun 2025 sesuai DIPA revisi ke-10 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Anggaran BBSPJPPI Tahun 2025

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SD/CP
OOIPOI	UKAIAN	Awal	Pemanfaatan Saldo Kas	Efektif	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	12.659.906.000	2.788.144.000	12.713.710.000	
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	12.659.906.000	2.788.144.000	12.713.710.000	
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000		329.675.000	
013	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	557.212.000		329.675.000	
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	285.484.000		171.109.000	BLU
Α	Temu Pelanggan	285.484.000		171.109.000	
052	Publikasi Layanan Jasa Teknis	271.728.000		158.566.000	BLU
Α	Promosi	228,696,000		134.516.000	
В	Pameran	43.032.000		24.050.000	



OUTPUT	LIDATANI		ANGGARA	N (Rp)	SD/CI
OUIPUI	URAIAN	Awal	Pemanfaatan Saldo Kas	Efektif	
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	8.755.599.000	2.788.144.000	10.630.465.000	
002	Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	6.390.307.000	2.323.382.000	5.562.617.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	6.200.577.000	2.323.382.000	5.502.181.000	BLU
A	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian	2,227,752,000	1.105.258.000	1.529.356.000	
В	Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran	3,202,825,000	1.218.124.000	3.202.825.000	
С	Layanan Pengujian Aneka Komoditi	770,000,000		770.000.000	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	189.730.000		60.436.000	BLU
022	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	524.236.000		475.736.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	462.920.000		462.920.000	BLU
Α	Layanan Kalibrasi	462.920.000		462.920.000	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	61.316.000		12.816.000	BLU
Α	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan	61.316.000		12.816.000	
	Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi				
034	Pencegahan Pencemaran Industri	940.140.000		940.140.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	714.700.000		714.700.000	BLU
Α	Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	72.600.000		72.600.000	
В	Layanan Sertifikasi Produk	508.560.000		508.560.000	
С	Layanan Sertifikasi Industri Hijau	38.460.000		38.460.000	
D	Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan	14.160.000		14.160.000	
E	Jasa Pelayanan Pemeriksa Halal	37.000.000		37.000.000	
F	Analisis Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri	43.920.000		43.920.000	
052	Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	225.440.000		225.440.000	BLU
А	Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	225.440.000		225.440.000	
055	Pencegahan Pencemaran Industri	217.110.000		217.110.000	
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	217.110.000		217.110.000	BLU
Α	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	217.110.000		217.110.000	
056	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis	28.668.000		28.668.000	
051	Pencegahan Pencemaran Industri Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	28.668.000		28.668.000	BLU



OUTPUT	LIDATANI		ANGGARA	N (Rp)	SD/CP
OUIPUI	URAIAN	Awal	Pemanfaatan Saldo Kas	Efektif	
А	Layanan Verifikasi TKDN	28.668.000		28.668.000	
057	Teknologi Industri	462.382.000	464.762.000	927.144.000	
	Pencegahan Pencemaran Industri Layanan Konsultansi dan	367.080.000	464.762.000	021 042 000	BLU
051	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	367.080.000	464.762.000	831.842.000	BLU
A.	Konsultansi Design IPAL dan Penyusunan Dokumen Pertek	155.190.000		155.190.000	
В	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	211.890.000	464.762.000	676.652.000	
052	Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	95.302.000		95.302.000	BLU
A.	Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	95.302.000		95.302.000	
096	lasa Pelayanan Teknis Ilii	155.668.000		155.668.000	
	lasa Pelayanan Teknis Ilii	112.000.000		112.000.000	BLU
051	Profisiensi Penyelenggara Uji Profisiensi				
A.	Almoditaci/Sumoillanco/	112.000.000		112.000.000	DIII
052	Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	43.668.000		43.668.000	BLU
A.	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji	43.668.000		43.668.000	
	Profisiensi				
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000		1.753.570.000	
013	Dorolatan Escilitac	3.347.095.000		1.753.570.000	
051	Dongadaan Poralatan Facilitas	3.347.095.000		1.753.570.000	BLU
A.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium	3.347.095.000		1.753.570.000	
WA	Program Dukungan Manajemen	23.499.225.000		20.411.347.000	
6042	Pengelolaan Manajeman	23.499.225.000		20.411.347.000	
6042.EBA	Lavanan Dukungan Manajemen	21.072.144.000		19.600.120.000	
958	Lavanan Hubungan Macyarakat	333.528.000		103.528.000	
051	Dangalalaan Data dan Informasi	333.528.000		103.528.000	BLU
A.	Pengelolaan Data dan Informasi	333.528.000		103.528.000	
962	Layanan Umum	73.958.000		73.958.000	
051	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga	73.958.000		73.958.000	BILL
A.	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	73.958.000		73.958.000	
994		20.664.658.000		19.422.634.000	
001	Gaji dan Tunjangan	14.982.432.000		14.982.432.000	RM



OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SD/CP
OUIPUI	URAIAN	Awal	Pemanfaatan Saldo Kas	Efektif	
Α	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14.647.771.000		14.647.771.000	
В	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	334.661.000		334.661.000	
002	Operacional dan Pemeliharaan	5.682.226.000		4.440.202.000	RM/ BLU
А	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	3.191.858.000		2.187.201.000	RM/ BLU
В	Langganan Daya Dan Jasa	916.200.000		732.638.000	RM/ BLU
С	Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor	717.570.000		717.570.000	RM/ BLU
D	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	271.540.000		217.735.000	RM/ BLU
Е	Pemeliharaan Alat Laboratorium	225.000.000		225.000.000	BLU
F	Pemeliharaan Sarana Kantor	106.258.000		106.258.000	RM/ BLU
G	Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	199.800.000		199.800.000	BLU
Н	Penyelenggaraan Poliklinik	54.000.000		54.000.000	BLU
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	1.474.826.000		201.735.000	
951	Layanan Sarana Internal	674.826.000		201.735.000	
051	Operasional	35.000.000		0	RM
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	298.266.000		0	RM
053	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran	341.560.000		201.735.000	BLU
971		800.000.000		0	
051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	800.000.000		0	BLU
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000		406.518.000	
954	Layanan Manajemen SDM	256.252.000		53.188.000	
051		256.252.000		53.188.000	RM/ BLU
996		444.272.000		353.330.000	
051	Rollipeterisi 3Divi	444.272.000		353.330.000	
Α	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN	60.160.000		60.160.000	BLU
В	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional	28.990.000		28.990.000	
С	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	355.122.000		264.180.000	RM/ BLU
6042.EBD	Internal	251.731.000		202.974.000	
952	Penganggaran	45.906.000		45.906.000	
051	Dali Aliyyarali	45.906.000		45.906.000	BLU
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	44.061.000		44.061.000	
	Pelaksanaan Pemantauan Dan			-	BLU



OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SD/CP
OUTPUT	URAIAN	Awal	Pemanfaatan Saldo Kas	Efektif	
955	Layanan Manajemen Keuangan	129.620.000		106.892.000	
051	Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	129.620.000		106.892.000	RM/ BLU
961	Layanan Reformasi Kinerja	32.144.000		6.115.000	
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP	32.144.000		6.115.000	BLU

2.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI, untuk mendukung pencapaian tujuan BSKJI dan tujuan BBSPJPPI telah menetapkan sasaran strategi yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI sebagaimana ditetapkan dalam Peta Strategis BBSPJPPI. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka juga telah ditetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan		
	Daya Saing Industri		
6077	Pengembangan dan	1.Meningkatnya kualitas	1. Indeks Kepuasan
	Penyelenggaraan Jasa	dan kuantitas layanan jasa	Masyarakat (IKM)
	Industri	industri Migas	2. Jumlah perusahaan
			industri/pelaku
			usaha/instansi yang
			memanfaatkan layanan jasa
			industri
		2.Terwujudnya layanan	1. Persentase pelayanan
		jasa industri yang	tepat waktu layanan sesuai
		professional	Service Level Agreement
			(SLA)
			2. Nilai Net Promoter Score
			(NPS)



Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		3.Terwujudnya layanan	1. Persentase peningkatan
		jasa industri yang mandiri	Penerimaan Negara Bukan
			Pajak (PNBP)
			2. Jumlah hasil layanan jasa
			industri
			3. Nilai Revenue on Asset
			(RoA)
			4. Rasio Pendapatan
			Operasional terhadap Biaya
			Operasional (POBO)
		4. Meningkatnya	1. Persentase penggunaan
		penggunaan Produk	Produk Dalam Negeri dalam
		Dalam Negeri dalam	pengadaan barang
		rangka menunjang	dam/atau jasa pemerintah
		produktivitas Industri	
019.07.WA	Program Dukungan		
	Manajemen		
6042	Pengelolaan Manajemen	1. Terwujudnya SDM yang	1. Indeks Profesionalitas
	Kesekretariatan Bidang	Profesional	ASN (IPASN)
	Standardisasi dan Pelayanan	2.Tercapainya	1. Rekomendasi hasil
	Jasa Industri	Pengawasan Internal Yang	pengawasan internal telah
		Efektif dan Efisien	ditindaklanjuti oleh satker
		Profesional	2. Nilai minimal hasil
			pengawasan kearsipan
			internal (Unit Kearsipan)
		3.Penguatan Sistem	1.Persentase jenis layanan
		Informasi terintegrasi dan	yang datanya terintegrasi
		pelayanan publik	dengan sistem informasi
			BSKJI
			2. Tingkat Penerapan Sistem



Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Pemerintahan Berbasis
			Elektronik (SPBE)
			3. Indeks Pelayanan Publik
			(IPP)
		4.Terwujudnya	1. Nilai minimal Sistem
		akuntabilitas organisasi	Akuntabilitas Instansi
			Pemerintah (SAKIP) Satker.
			2. Nilai minimal Indikator
			Kinerja Pelaksanaan
			Anggran IKPA

Selain itu terkait dengan pelaksanaan anggaran sesuai DIPA BBSPJPPI TA 2025, telah ditetapkan target keluaran untuk masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut

Tabel 6. Klasifikasi Rincian Output dan Target Tahun 2025

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Target		
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	150 (Orang	
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	798	Industri	
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	38	Unit	
4	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	Layanan	
5	6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	91	Unit	
6	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	162	orang	
7	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8	dokumen	

Bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebagai



bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2025 berpedoman pada Renstra BBSPJPPI 2025-2029 dengan target kinerja ditetapkan sesuai target kinerja tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja utama pada Perkin ditetapkan berdasarkan indikator tujuan pada Peta Strategis BBSPJPPI.

Berdasarkan pembahasan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada satker di lingkungan BSKJI, ditetapkan indikator dan target kinerja Perkin tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Perkin BBSPJPPI Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
1.	Meningkatnya	1.	Indeks Kepuasan	3,68	indeks	IKU
	kualitas dan		Masyarakat (IKM)			
	kuantitas layanan	2	Jumlah perusahaan	960	Perusahaan	IKU
	jasa industri		industri/pelaku		Industri /	
			usaha/instansi yang		Pelaku	
			memanfaatkan layanan		Usaha /	
			jasa industri		Instansi	
2.	Terwujudnya	1	Persentase pelayanan	88	Persen	Non
	layanan jasa		tepat waktu layanan			IKU
	industri yang		sesuai Service Level			
	profesional		Agreement (SLA)			
		2	Nilai Net Promoter Score	40	Nilai	Non
			(NPS)			IKU
3.	Terwujudnya	1.	Persentase peningkatan	27.71	Persen	Non
	layanan jasa		Penerimaan Negara Bukan			IKU
	industri yang		Pajak (PNBP)			
	mandiri	2.	Jumlah hasil layanan jasa	7.500	Hasil	Non
			industri		Layanan	IKU
		3.	Nilai Revenue on Asset	14.50	Persen	Non
			(RoA)			IKU



Sasaran No. Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
	Kegiatan	_		5422		
		4.	Rasio Pendapatan	54.22	Persen	Non IKU
			Operasional terhadap			
			Biaya Operasional (POBO)			
4.	Terwujudnya	1.	Indeks Profesionalitas ASN	81.30	Indeks	Non IKU
	SDM yang		(IPASN)			IKO
	profesional					
5	Penguatan	1	Persentase jenis layanan	20	Persen	Non
	Sistem Informasi		yang datanya terintegrasi			IKU
	terintegrasi dan		dengan sistem informasi			
	pelayanan publik		BSKJI			
		2	Tingkat Penerapan Sistem	80	Persen	Non
			Pemerintahan Berbasis			IKU
			Elektronik (SPBE)			
		3	Indeks Pelayanan Publik	4.62	Indeks	Non
			(IPP)			IKU
6.	Tercapainya	1.	Rekomendasi hasil	50	Persen	Non
	Pengawasan		pengawasan internal telah			IKU
	Internal Yang		ditindaklanjuti oleh satker			
	Efektif dan Efisien	2	Nilai minimal hasil	91.84	Nilai	Non
			pengawasan kearsipan			IKU
			internal (Unit Kearsipan)			
7.	Terwujudnya	1.	Nilai minimal Sistem	82	Nilai	Non
	akuntabilitas		Akuntabilitas Instansi			IKU
	organisasi		Pemerintah (SAKIP) Satker			
		2	Nilai minimal Indikator	94	Nilai	Non
			Kinerja Pelaksanaan			IKU
			Anggran IKPA			

LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2025



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
	Kegiatan					
8	Meningkatnya	1	Persentase penggunaan	53	Persen	Non
	penggunaan		Produk Dalam Negeri			IKU
	Produk Dalam		dalam pengadaan barang			
	Negeri dalam		dam/atau jasa pemerintah			
	rangka					
	menunjang					
	produktivitas					
	Industri					



BAB. III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada awal tahun 2025 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) telah membuat Perjanjian Kinerja (Perkin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala BBSPJPPI kepada Kepala Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak kinerja Kepala BBSPJPPI.

Rencana kerja untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya dirinci ke dalam rencana aksi setiap triwulan yang dipantau secara berkala. Rencana aksi yang disusun guna mendukung upaya pencapaian target kinerja BBSPJPPI dapat dilihat pada lampiran.



3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

A. Tujuan: Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Tabel 8.Pengukuran Realisasi Tujuan Triwulan III TA 2025

		Indikator						Triwulan III	
No.	Tujuan	an Kinerja		Realisasi	Capaian	%	Fisik	Keg	iatan
		Killerja	Killerju			Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	3,70 indeks	100,54%	75%	75%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW III 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian	B7-B9: Penyebaran keusioner ke palanggan dengan jumlah kuesioner yang kembali sampa TW III sebanyak 204 buah dengan nilai 3,70.
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	762 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	79,38 %	75%	75%	TW III 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke	B7-B9: Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi sampai TW III sebanyak 762 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi.
								industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW	



Tujuan terdiri dari dua Indikator Kinerja, meliputi :

1) Indikator Kinerja Tujuan 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tingkat kepuasan pelanggan yang dicapai oleh Satker diukur melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan cara menyebarkan kuesioner yang sudah diuji validitasnya. Target kinerja IKM menggunakan skala indeks 1-4 dengan kuesioner yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan format Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017.

a Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, BBSPJPPI setiap tahun melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan survey kepuasan pelanggan.

Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan BBSPJPPI telah mengacu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaran Pelayanan Publik.

Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu : Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Responden dari survei ini adalah pengguna layanan BBSPJPPI, baik perorangan maupun organisasi yang pernah menggunakan layanan jasa di BBSPJPPI dan dipilih secara acak.

Pada triwulan III target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi 75 %.

Adapun rencana kegiatan triwulan III adalah

- 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW III
- 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III
- 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM TW III.



Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

1.Bulan Juli

- 1] Penyebaran kuesioner kepada 202 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 17 responden
- 2] Hasil analisa IKM bulan Juli berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,83 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan Juli sebesar 3,69.

2.Bulan Agustus

- 1] Penyebaran kuesioner kepada 208 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 24 responden
- 2] Hasil analisa IKM bulan Agustus berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,73 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan Agustus sebesar 3,70.

3.Bulan September

- 1] Penyebaran kuesioner kepada 207 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 26 responden.
- 2] Hasil analisa IKM bulan Juni berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,68 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan September sebesar 3,70.

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target fisik rencana kinerja sd Triwulan III telah berhasil dilaksanakan.

b Kendala

Tingkat partisipasi pelanggan dalam pengisian kuesioner IKM masih rendah. Hal ini ditandai dengan sulitnya mencari responden survey indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan III yang berkenan mengisi survey (mengembalikan kuesioner yang sudah disebar). Salah satu penyebabnya karena pada sistem SINDI setelah perusahaan mengunduh LHU mandiri tidak ada keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan.

c Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah selalu meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan kualitas layanan agar capaian IKM sesuai target dan dapat meningkatkan partisipasi pelanggan dalam pengisian dan pengembalian kuesioner kepuasan pelanggan yang telah diisi.



Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- Menyasar pelanggan yang datang ke BBSPJPPI untuk langsung mengisi form kuesioner setelah dilakukan proses pelayanan
- Dilakukan blasting kuesioner wa dan email secara lebih intens dan terjadwal.
- Pada sistem SINDI pengisian kuesioner saat mengunduh LHU dibuat otomatis dan wajib.
- Untuk pelanggan sertifikasi, kuesioner dapat diberikan sebelum sertifikat SPPT SNI, Sertifikat ISO
 9001, Sertifikat Industri Hijau, Sertifikat ISO 14001 diserahkan kepada pelanggan.

2) Indikator Kinerja Tujuan 1.2 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Jumlah realisasi layanan dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Hal ini mengingat kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan III TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 75% dengan realisasi 75%. Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI
- 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW III

Realisasi fisik dari kegiatan sampai September 2025 adalah capaian realisasi layanan teknis berdasarkan jumlah transaksi/order dari periode bulan Januari sampai September berdasarkan data berikut :



Tabel 9 Jumlah Layanan Jasa Yang Digunakan Oleh Industri

No	Jenis Layanan	Satuan	Realisasi Layanan
			Januari-September 2025
1	Layanan Pengujian	Perusahaan/pelaku industri/instansi	415
2	Layanan Kalibrasi	·	48
3	Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis		13
4	Layanan Sertifikasi		197
5	Layanan Inspeksi Teknik		0
6	Layanan Konsultansi (Penyusunan Pertek)		3
7	Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)		1
8	Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan (Design IPAL)		1
9	Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)		31
10	Layanan Pemeriksaan Produk Halal		10
11	Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi		43
12	Layanan Produsen Bahan Acuan		0
13	Layanan lainnya		0
		Total	762

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan.



b. Kendala

Perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja telah berhasil dicapai. Tetapi ada beberapa kendala yang mengakibatkan capaian belum optimal antara lain :

- 1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah
- 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian
- 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti penyelenggara uji profisisensi, pemeriksaan halal, verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
- 4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan pendekatan kembali kepada pelanggan yang beralih dari BBSPJPPI dengan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan.

Rencana perbaikan triwulan selanjutnya adalah :

- 1 Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan.
- 2 Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi
- 3 Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon
- 4 Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi.
- 5 Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI.
- 6 Melakukan Kerjasama dengan vendor/balai lain.
- 7 Mengoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia



B. Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Profesional

Tabel 10.Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 1 Triwulan III TA 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realis	Capaia		Sam	pai Triwulan	III
	Kegiatan	Kinerja		asi	n	% F	isik	Ke	giatan
						Target	Realis	Rencana	Realisasi
							asi	Kegiatan	Kegiatan
1	Terwujudny	1. Persentase	88	92,97	105,65	75%	75%	1.	B7 :
	a layanan	pelayanan	Persen	Persen	%			Melakukan	Jumlah order
	jasa industri	tepat waktu						review	Bulan Juli
	yang	layanan sesuai						terhadap	sebesar 832
	profesional	Service Level						SPK atau	order dengan
		Agreement						permintaan	order yg sesuai
		(SLA)						jasa layanan	SPM 708 order.
								2.	B8:
								Melakukan	Jumlah order
								perawatan	Bulan Agustus
								terhadap	sebesar 698
								peralatan	order dengan
								pengujian/	order yg sesuai
								kalibrasi	SPM 678 order.
								3.	B9:
								Melakukan	Jumlah order
								kegiatan	September
								pengambila	sebesar 579
								n sampel	order dengan
								layanan jasa	order yg sesuai
								teknis TW III	SPM 577 order.
								4.	
								Melakukan	
								monitoring	
								dan evaluasi	
								terhadap	
								capaian	
								SPM TW III.	
		2. Nilai <i>Net</i>	40 nilai	62,25	155,63	75%	75%	1]	B7 – B9: jumlah
		Promoter Score (NPS)		nilai	%			Penyebaran	responden
								kuesioner	sampai
								kepuasan	September 204
								pelanggan	responden
								2] Evaluasi	dengan
								dan	promotor 135
								penghitung	responden,
									. copoliacily



No.	Sasaran	Indikator	Target	Realis	Capaia		Sampai Triwulan III		
	Kegiatan	Kinerja		asi	n	% F	isik	Kegiatan	
						Target	Realis	Rencana	Realisasi
							asi	Kegiatan	Kegiatan
								an statistisi	passives 61
								penilaian	pelanggan dan
								Net	detractors 8
								Promoter	pelanggan
								Score (NPS)	
								TW III	

Sasaran Kegiatan 1, mempunyai dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1) Indikator Kinerja Sasaran 1.1 : Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA).

Persentase Pemenuhan Waktu Layanan Sesuai Service Level Agreement (SLA) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepatuhan balai dalam memberikan layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SLA atau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator ini mencerminkan efisiensi dan keandalan layanan yang diberikan kepada pengguna, di mana semakin tinggi persentasenya, semakin baik kepatuhan terhadap standar waktu layanan yang dijanjikan.

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA =

(Σ Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SPM/Σ Pelayanan yang diberikan) x 100%

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran 1.1 : " Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)" Pada Triwulan III TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi 75 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah:

- 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan
- 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi
- 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW III
- 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW III.



- 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan
- 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan.

Realisasi Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan III adalah

Tabel 11. Perhitungan SLA Juli - September 2025

	Ju	li	Agu	stus	Septem	ber
Layanan	Jumlah	Sampel	Jumlah	Sampel	Jumlah	Sampel
	sampel/	sesuai	sampel/	sesuai	sampel/	sesuai
	transaksi/	SPM	transaksi/	SPM	transaksi/	SPM
	Order		Order		Order	
Layanan	690	566	589	569	437	435
Pengujian						
Layanan	42	42	54	54	83	83
Kalibrasi						
Layanan	0	0	4	4	4	4
Bimbingan dan						
Pendampingan						
Teknis						
Layanan	111	11	33	33	22	22
Sertifikasi						
Layanan	0	0	0	0	0	0
Inspeksi Teknik						
Layanan	0	0	0	0	0	0
Konsultansi						
(Penyusunan						
Pertek)						
Layanan	0	0	0	0	0	0
Teknologi						
Proses dan						
Mesin						
(peralatan AiMS)						
Layanan Jasa	0	0	0	0	0	0
Rancang						
Bangun dan						
Perekayasaan						
(Design IPAL)						
Layanan	68	68	18	18	18	18
Verifikasi (TKDN,						
GRK)						
Layanan	0	0	0	0	13	13
Pemeriksaan						
Produk Halal						



	Ju	li	Agu	stus	September		
Layanan	Jumlah	Sampel	Jumlah	Sampel	Jumlah	Sampel	
	sampel/	sesuai	sampel/	sesuai	sampel/	sesuai	
	transaksi/	SPM	transaksi/	SPM	transaksi/	SPM	
	Order		Order		Order		
Layanan	21	21	0	0	2	2	
Penyelenggara							
Uji Profisiensi							
Layanan	0	0	0	0	0	0	
Produsen Bahan							
Acuan							
Layanan lainnya	0	0	0	0	0	0	
Total	832	708	698	678	579	577	

Sehingga total order sampai TW III sebanyak 5.801 order dimana yang sesuai SPM sebesar 5.293 order sehingga rata -rata SLA TW III sebesar 92,97%

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala.

Tidak ada kendala tetapi bisa ditingkatkan terkait sistem monitoring penyelesaian layanan yang belum semua layanan terintegrasi dengan SINDIII.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini realisasi penyelesaian layanan sd Triwulan III 2025 secara umum masih memenuhi target, namun tetap perlu dilakukan monitoring penyelesaian pekerjaan yang bisa dimonitoring melalui SINDIi.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah memonitoring proses layanan pengujian jika ada keterlambatan segera diselesaikan dan memberitahukan informasi tersebut kepada pelanggan. Disamping itu, untuk mendukung kelancaran operasional layanan pengujian agar turut dilakukan upaya pemeliharaan mesin peralatan berkala, evaluasi ketersediaan stock bahan kimia dan sparepart secara berkala serta pengaturan jadwal sampling bagi analis yang juga bertugas sebagai petugas PPC.



2) Indikator Kinerja Sasaran 1.2 : Nilai Net Promoter Score (NPS)

NPS adalah metrik yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan, dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. NPS sering dianggap sebagai prediktor utama pertumbuhan perusahaan.

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

Kategorisasi responden:

- >**Promoters** (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.
- >Passives (7-8): Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.
- *>Detractors* (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*.

NPS = %Promoters - %Detractors

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*)

Kriteria Penilaian

- Nilai 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran Nilai Net Promotor Score (NPS) Pada Triwulan III TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi 75 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah:

- 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan
- 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW III.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan III adalah



1.Bulan Juli

- ✓ Penyebaran kuesioner sampai Bulan Juli sebanyak 154 kuesioner dengan rincian promoters sebanyak 98 pelanggan, passives 48 pelanggan dan detractors 8 pelanggan.
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Juli 2025 adalah sebesar 58,44.

2.Bulan Agustus

- ✓ Penyebaran kuesioner sampai Bulan Agustus sebanyak 178 kuesioner dengan rincian promoters sebanyak 115 pelanggan, passives 55 pelanggan dan detractors 8 pelanggan
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Agustus 2025 adalah sebesar 60,11.

3.Bulan September

- ✓ Penyebaran kuesioner sampai Bulan September sebanyak 204 kuesioner dengan rincian promoters sebanyak 135 pelanggan, passives 61 pelanggan dan detractors 8 pelanggan
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan September 2025 adalah sebesar 62,25.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Jumlah responden pengisian NPS mengikuti jumlah responden pengisian IKM dimana tingkat pengembalian kuesioner masih sedikit dibanding jumlah kuesioner yang disebar. Salah satu penyebabnya karena pada sistem SINDIi setelah perusahaan menunduh LHU mandiri tidak ada keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah jumlah sampel kuesioner NPS yang diterima masih belum memenuhi/mencerminkan populasi jumlah pelanggan yang dilayani sd Triwulan III 2025 sehingga perlu dilakukan strategi untuk menghimpun pengisian kuesioner yang feedback/hasilnya dapat langsung diterima/kembali ke BBSPJPPI seperti misalnya dengan menyasar pelanggan yang datang langsung ke BBSPJPPI agar dapat langsung melakukan pengisian form kuesioner yang telah disampaikan petugas layanan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- ✓ Dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran.
- ✓ Pada sistem SINDIi dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU.



C. Sasaran Kegiatan 2 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Mandiri

Tabel 12.Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 2 Triwulan III TA 2025

No.	Sasaran	Indikator	Targ	Realis	Capaia			Sampai Triwulan III	I
	Kegiatan	Kinerja	et	asi	n	% F	isik	Kegi	atan
						Target	Realis	Rencana	Realisasi
							asi	Kegiatan	Kegiatan
1	Terwujudny	1.	27,71	21,02%	%	75%	75%	1] Promosi dan	B7:
	a layanan	Persentase	%	(peneri				publikasi jasa	Penerimaan
	jasa industri	peningkatan		maan				layanan BBSPJPPI	sampai Bulan Juli
	yang	Penerimaan		jan-sept				2] Pembuatan	2025 sebesar Rp.
	mandiri	Negara		2025-				penawaran dan	10.391.371.008,-
		Bukan Pajak		peneri				kontrak kerjasama	B8:
		(PNBP)		maan				jasa layanan	Penerimaan
				jan-sept				3] Pemberian jasa	sampai bulan
				2024)				layanan teknis ke	Agustus 2025
				dibagi				industri sesuai	sebesar Rp.
				peneri				permintaan yang	11.536.178.976,-
				maan				disepakati	B9:
				jan-juni				4] Menjalin	Penerimaan PNBP
				2024				komunikasi efektif	BBSPJPPI sampai
								dan berkelanjutan	dengan bulan
								kepada pelanggan	September 2025
								untuk menjaga	sebesar Rp.
								kesetiaan	14.870.290.922,-
								pelanggan kepada	
								BBSPJPPI.	
								5] Monitoring dan	
								Evaluasi Capaian	
								TW III.	
		2. Jumlah	7500	6164	82,19%	75%	75%	1] Promosi dan	B7:
		hasil	hasil	hasil				publikasi jasa	Jumlah layanan
		layanan jasa	layana	layanan				layanan BBSPJPPI	jasa industri
		industri	n					2] Pembuatan	sampai Juli 2025
								penawaran dan	sebesar 4580 hasil
								kontrak kerjasama	layanan.
								jasa layanan	B8:
								3] Pemberian jasa	Jumlah layanan
								layanan teknis ke	jasa industri
								industri sesuai	sampai Agustus
								permintaan yang	2025 sebesar 5277
								disepakati	hasil layanan



No.	Sasaran	Indikator	Targ	Realis	Capaia			Sampai Triwulan III	1
	Kegiatan	Kinerja	et	asi	n	% F	isik	Kegi	atan
						Target	Realis	Rencana	Realisasi
							asi	Kegiatan	Kegiatan
								4] Menjalin	B9:
								komunikasi efektif	Jumlah layanan
								dan berkelanjutan	jasa industri
								kepada pelanggan	sampai September
								untuk menjaga	2025 sebesar 6164
								kesetiaan	hasil layanan
								pelanggan kepada	
								BBSPJPPI	
								5] Monitoring dan	
								Evaluasi Capaian	
								TW II.	
		3. Nilai	14.50	11,62%	80,14 %	75%	75%	1] Melakukan	B7-B9 :
		Revenue on	%					monitoring	1.Melakukan
		Asset (RoA)						penerimaan BLU	monitoring
								2] Melakukan	penerimaan BLU
								inventarisasi aset	Juli - September
								yang menjadi	2025
								sumber	2. melakukan
								penerimaan BLU	pengesahan
								3] Monitoring	penerimaan Juli-
								penghapusan aset	September 2025.
								tetap pada tahun	3. Updating nilai
								berjalan	buku asset satuan
									kerja.
									Dimana
									Penerimaan Rp
									14.870.290.922,-
									sedangkan asset
									tetap
									Rp.127.976.236.314
		4. Rasio	54,22	71,71%	132 %	75%	75%	1] Melakukan	B7-B9 :
		Pendapatan	Persen					monitoring	1.Melakukan
		Operasional						penerimaan BLU	monitoring
		terhadap						2] Melakukan	penerimaan BLU
		Biaya						update realisasi	Bulan Juli-
		Operasional						belanja/pengeluara	September 2025.
		(POBO)						n operasional	2.Melakukan
									pengesahan



No.	Sasaran	Indikator	Targ	Realis	Capaia			Sampai Triwulan III	I		
	Kegiatan	Kinerja	et	asi	n	% Fisik		Kegiatan			
						Target	Realis	Rencana	Realisasi		
						asi		Kegiatan	Kegiatan		
									penerimaan dan		
								belanja BLU Juli-			
								September 2025.			
									Dimana		
									pendapatan		
									operasional		
									Rp.14.870.290.922		
								sedangkan belanja			
								operasional			
								Rp.20.737.316.569			

Sasaran Kegiatan 2, mempunyai empat Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1) Indikator Kinerja Sasaran 2.1 : Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.

Disamping itu, untuk mendukung sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010, BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berkaitan dengan pengelolaan sebagai satker BLU, pencapaian kinerja dalam hal pemberian layanan jasa teknis ke pelanggan diharapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan/peningkatan baik dari sisi kualitas layanan maupun dari aspek kuantitas realisasi penerimaan PNBP

a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran " 1. Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" Pada Triwulan III TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi 75 %.



Adapun rencana kegiatan tersebut adalah:

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.
- 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan III adalah

- 1. Melakukan promosi layanan jasa pelanggan.
- 2. Membuat kontrak penawaran
- 3. Monitoring dan evaluasi capaian penerimaan Triwulan III
- Penerimaan Januari September 2025 sebesar Rp. 14.870.290.922,- (79,58%) dari target
 Rp. 18.686.000.000,-

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Ada beberapa kendala yg mengakibatkan penerimaan PNBP BBSPJPPI masih dirasa belum optimal antara lain :

- Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya himbauan dari DLH kepada industri untuk mengujikan di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH).
- 2. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah.
- 3. Ruang lingkup layanan pengujian masih terbatas.
- 4. Ruang lingkup layanan kalibrasi masih terbatas.
- 5. Proses penagihan untuk kontrak Kerjasama pemantauan lingkungan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama.
- Masyarakat belum familiar dan terinformasi terkait kompetensi dan lingkup jasa layanan BBSPJPPI dikarenakan masih kurangnya informasi tentang BBSPJPPI.



c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan peningkatan penerimaan PNBP dari seluruh layanan jasa BBSPJPPI (tidak hanya terpaku penerimaan dari layanan pengujian), perlunya monitoring setiap bulan pihak manajemen terkait kendala ataupun realisasi inovasi baik dari segi layanan, proses maupun penyelesaian keuangan terkait progres penagihan serta perlunya segera dilakukan peninjauan tarif BLU BBSPJPPI untuk layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

- Meningkatkan promosi untuk lingkup layanan baru BBSPJPPI (uji RATA, Uji Profisiensi, Pemeriksaan Halal) dengan memanfaatkan media sosial balai maupun melalui partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pameran.
- 2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).
- Mendorong peluang pengembangan jasa layanan baru yang memiliki prospek terhadap peningkatan penerima PNBP (kalibrasi AQMS, sertifikasi profesi, verifikasi dan validasi GRK).
- 4. Dilakukan koordinasi intensif berkala antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan untuk pekerjaan kontrak kerjasama pemantauan lingkungan.

2) Indikator Kinerja Sasaran 2.2 : Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Catatan:

- 1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan.
- 2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP berbayar.



Cara Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n (tahun berjalan). Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam tahun berjalan dengan satuan sebagai berikut:

- 1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)
- 2. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)
- 3. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Sertifikat/ Laporan)
- 4. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Laporan Hasil Surveillance)
- 5. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)
- 6. Layanan Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi/ Kajian)
- 7. Layanan Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin)
- 8. Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)
- 9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi)
- 10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan)
- 11. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Hasil Uji)
- 12. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: sampel)
- 13. Layanan lainnya (satuan: Laporan/ order/ SPK/ rekomendasi)

a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran Jumlah hasil layanan jasa industri. Pada Triwulan III TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi 75 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI
- 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan III adalah

Jumlah hasil layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 6164 layanan meliputi:



- a) Pengujian = 5336 LHU
- b) Kalibrasi = 375 LHU
- c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 119 sertifikat/ laporan
- d) Sertifikasi = 212 sertifikat/ hasil surveilen
- e) Inspeksi Teknis = 0 laporan
- f) Konsultansi (penyusunan pertek) = 3 laporan
- g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1
- h) RBP (desain IPAL) = 1
- i) Verifikasi TKDN = 104
- i) LPH = 13
- k) PUP = 0
- I) PBA = 0
- m) lainnya = 0

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b Kendala.

- Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah
- 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian
- 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
- 4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI secara umum khususnya terkait pengembangan layanan baru BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan

c Rekomendasi

Evaluasi dari triwulan ini diperlukan pendekatan kembali kepada pelanggan yang beralih dari BBSPJPPI dengan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah

- 1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan.
- 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi
- 3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon



- 4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi
- Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI
- 6. Mengoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia.

3) Indikator Kinerja Sasaran 2.3 : Nilai Revenue on Asset (RoA)

Nilai Revenue on Asset (RoA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas di balai dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan operasional dengan total nilai aset yang digunakan dalam operasional instansi. Semakin tinggi nilai RoA, semakin baik tingkat produktivitas aset dalam menghasilkan pendapatan.

Cara menghitungnya yaitu Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun ke-n dibagi dengan total nilai aset pada tahun ke-n (tahun berjalan) dikalikan 100%.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran Nilai Revenue on Asset (RoA). Pada Triwulan III TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi 75 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah:

- 1. Melakukan monitoring penerimaan BLU
- 2. Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU
- 3. Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan III adalah

- 1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Juli-September 2025
- 2. Melakukan pengesahan penerimaan periode Juli-September 2025
- 3. Melakukan updating nilai buku aset satuan kerja Juli-September 2025

b. Kendala.

Tidak ada kendala.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah belum seluruh aset tetap yang dimiliki khususnya aset bangunan dan mesin peralatan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan penerimaan.



Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya diantaranya dengan melakukan monitoring penerimaan dan updating nilai buku asset satuan kerja dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat.

4) Indikator Kinerja Sasaran 2.4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

POBO = (Pendapatan Operasional / Biaya Operasional) x 100%

Catatan:

- Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator "Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)".
- 2. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran RM APBN dan pendapatan PNBP, **tidak termasuk** penyusutan, dan amortisasi.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja "4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO). Pada Triwulan III TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi 75 %. Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU
- 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan III adalah

- 1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Juli-September 2025.
- 2. Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU periode Juli-September 2025

b. Kendala

Tidak ada kendala

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memonitoring capaian nilai Pendapatan Diterima di Muka (PDDM) setiap bulan.



Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM.

D. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya SDM yang professional

Tabel 13. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 3 Triwulan III TA 2024

	Sasaran	Indikator				Fisil	(%)	Kegiatan S	Sampai triwulan III
No	Kegiatan	Kinerja	Target	Reali sasi	Capai an	Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya	Indeks	81.30	81,41	100,14	75	75	1] Koordinasi dan	B7-B9:
	SDM yang	Profesionalita	Indeks	Indeks	%			penyusunan rencana	1.Monitoring kesesuaian usulan
	profesional	s ASN						diklat teknis 20 JPL	rencana pelatihan 2025 TW III.
		(IPASN)						dan diklat struktural	2. Fasilitasi diklat /pelatihan
								2] Pelaksanaan	peningkatan kompetensi pegawai
								workshop/	BBSPJPPI.
								Bimtek/seminar/webin	3.pengumpulan bukti sertifikat
								ar untuk mendukung	pelatihan peningkatan
								peningkatan	kompetensi sampai TW III.
								kompetensi untuk	4.Evaluasi pelaksanaan
								seluruh pegawai	peningkatan kompetensi SDM
								3] Pengumpulan bukti	sampai TW III.
								peningkatan	
								kompetensi SDM	
								berkala	
								4] Evaluasi	
								pelaksanaan	
								peningkatan	
								kompetensi SDM TW	
								III.	

Sasaran Kegiatan 3 mempunyai satu Indikator Kinerja yaitu **Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN** (**IPASN**)

1) Indikator Kinerja Sasaran 3.1 : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat



profesionalitas pagawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja

Pada Triwulan III target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi 75 %.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah:

- 1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural
- 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai
- 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala
- 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW III.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah :

- Evaluasi rencana dan Realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran
- 2. Pembaruan Data Pelatihan dan Pendidikan Pegawai
- 3. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi ((Webinar UNDIP Sustainability Talks #Series 6 "Circular Economy Innovation In Higher Education Institutions"; Sharing Session dengan tema Penegakan Disiplin ASN dalam Koridor Pengawasan dan Pengendalian Impementasi Manajemen ASN)
- 4. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Kick Off Webinar Pelatihan Artificial Intelegence GARUDA dengan Tema AI dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi: Data-Driven Policy & Market Insight; Sharing Session dengan tema The Art of Leadership: Seni Memimpin Diri, Tim dan Organisasi)
- 5. Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (Penugasan Latsar & PKTBT CPNS 2024)
- 6. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Workshop Restorasi Arsip; Workshop Digitalisasi Arsip; Sharing Session dengan tema Smart Talent Management: Pemanfaatan AI Untuk Membangun ASN Masa Depan; Seminar Nasional Mewujudkan Layanan Arsip Efektif Melalui Pengelolaan Arsip Dinamis; Workshop Nasional Pengelolaan Arsip Dinamis Menuju Layanan Arsip Terintegrasi; Pelatihan Asesor Kompetensi LSP BBSPJPPI; Webinar Online Analisis Permasalahan Lingkungan)

Dari data di atas, maka indikator ini berhasil dilaksanakan.



b. Kendala

- 1] Pelatihan Kepemimpinan Menunggu penugasan dari BSKJI.
- 2] Perubahan Kebijakan Penerapan Diklat Fungsional di masing-masing unit pembina termasuk penjadwalan.
- 3] Adanya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana pelatihan peningkatan kompetensi SDM berkurang dan diprioritaskan pelaksanaan pelatihan via daring.
- 4] Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshoot)

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dengan rencana pelatihan 2025 dan juga evaluasi nilai indeks profesionalitas ASN setiap periodik sehingga di akhir tahun dapat mencapai target perjakin yang ditetapkan.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah :

- 1] Koordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2025
- 2] Monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar
- 3] Koordinasi lebih lanjut terkait jadwal dan usulan pelatihan PKN & PKA 2025 dengan Biro OSDMRB, Ses.BSKJI dan BPSDM
- 4] Mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi
- 5] Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat
- 6] Mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai.



E. Sasaran Kegiatan 4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 14. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 4 Triwulan III TA 2024

	Sasaran	Indikator	_			Fisik (%)		Kegiatan sampai T	riwulan III	
No	Kegiatan	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1 1			20 Persen	Realisasi 19 Persen	Capaian 95%	75	Realisasi 75			
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80 Persen	65,75 Persen	82,19 Persen	75	75	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang. 2] Melakukan ujicoba implementasi sistem SPBE secara terbatas.	B7-B9: -Melakukan implementasi sistem SPBE - Mengumpulkan bukti dukung implementasi SPBE.	
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	462 indeks	Penilaian mandiri di akhir tahun	-	75	75	1] Pengembangan/ pemutakhiran SINDIII. 2] Update website secara berkala 3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS	B7-B9: 1.meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya. 2.update website, medsos, konten SIPPN dan semua media BBSPJPPI. 3.mengikuti pameran 3rd POMI, AIGIS,4.0 conference & Expo 2025,dan Halal Expo.	



Sasaran Kegiatan 4 mempunyai tiga Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1) Indikator Kinerja Sasaran 4.1 : Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI.

Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu yang terintegrasi merupakan suatu kebutuhan bagi BSKJI karena saat ini setiap Satker yang memiliki pelayanan publik menggunakan *platform* yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pimpinan dan stakeholder terkait dalam mengakses informasi layanan publik yang telah diberikan oleh setiap Satker.

Cara menghitungnya adalah Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan inovasi. Adapun jenis layanan yang akan dilintegrasikan meliputi pengujian, sertifikasi, kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis, dan konsultansi.

Integrasi yang dimaksud di atas adalah menggunakan metode *Application Programming Interface* (API).

Menjumlahkan jenis layanan di UPS BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI melalui API pada tahun ke-n dibagi dengan total jumlah jenis layanan yang akan dIIIntegrasikan di UPT BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Catatan:

Secara akumulatif, pada tahun 2025 target integrasi layanan pengujian, bertambah di tahun 2026 layanan sertifikasi, 2027 layanan kalibrasi, 2028 layanan bimbingan dan pendampingan teknsi, 2029 layanan konsultansi.

a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja

Pada triwulan III target fisik dari indikator ini adalah 75% dengan realisasi 75%.

Adapun rencana kegiatan triwulan III adalah

- 1. Uji Coba Integrasi Sistem
- 2. Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Sistem.
- 3. Evaluasi dan Perbaikan Sistem.



Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1.Bulan Juli

Ujicoba integrasi data server SINDI untuk layanan pengujian dan kalibrasi dengan SIPPT BSKJI sudah dilakukan dengan hasil integrasi data sudah berjalan dengan baik dengan interval pengiriman 1 hari secara otomatis, alur pengiriman dari awal hingga diterima sudah berjalan dengan baik.

2.Bulan Agustus

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengguna untuk konfigurasi API (Application Programming Interface) SINDI dengan SIPPT BSKJI sudah dilakukan secara internal dan sudah dilakukan konfigurasi pengaturan integrasi data.

3.Bulan September

Hasil evaluasi terkait manual dan sistem respon pada SIPPT BSKJI belum dilakukan perbaikan untuk umpan balik informasi jika data kegagalan pengiriman dari SINDI, perlu dilakuakan validasi dan rekonsiliasi data pengiriman melalaui API dan googlesheet agar sesui dengan pelaporan.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

✓ Belum adanya update manual dan sistem pada SIPPT BSKJI yang dapat memberikan umpan balik jika terjadi kegagalan pengiriman dari SINDI sehingga mengakibatkan selisih data perhitungan layanan pengujian dan kalibrasi.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi intensif dengan BSKJI terkait respon sistem SIPPT.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah Melakukan konsultasi dengan admin SIPPT BSKJI melalui forum grup integrasi data BSJKI agar dapat memberikan solusi untuk pengiriman data yang tertunda atau tidak dapat di terima pada sisi server SIPPT.

2) Indikator Kinerja Sasaran 4.2.: Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tingkat Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan ukuran yang
digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas,



dan transparansi layanan. Penilaian ini mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan, serta infrastruktur pendukung SPBE di suatu instansi.

Cara menghitungnya adalah memberikan penilaian pada Kertas Kerja Perhitungan Indikator Tingkat Penerapan SPBE, dengan indikator yang dinilai meliputi Tata Kelola SPBE (11 sub indikator), Manajemen SPBE (8 sub indikator), Layanan SPBE (4 sub indikator).

Dari setiap sub indikator yang berjumlah total 23 tersebut, perlu dibutktikan dengan data dukung sesuai kriteria. Masing-masing unit organisasi mengupload data dukung pada Lemon Kemenperin yang disediakan oleh Pusdatin.

a) Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja

Pada triwulan III target fisik dari indikator ini adalah 75% dengan realisasi 75%.

Adapun rencana kegiatan triwulan III adalah

- 1. Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang
- 2. Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara tertata

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1.Bulan Juli

[1] Kegiatan perawatan aplikasi di server SINDI dilaksanakan dengan ketentuan sesuai SPBE diantaranya:

Reviu pembangunan aplikasi SPBE telah dilaksanakan

- Optimasi koneksi socket SINDI-UDARAKU
- Dokumentasi (pencatatan) time date backup database
- Manajemen Space Penyimpanan data backup database SINDII
- Monitoring space penyimpanan server SINDII
- Renewal SSL infrasutruktur SPBE (SINDI, udaraku, IOT, website BBSPJPPI)
- Perawatan module-stock
- Update Integrasi data SINDII ke SIPPT
- [2] Konsultasi anggaran SPBE dengan Pusdatin tentang pemeliharaan aplikasi SPBE



2.Bulan Agustus

- [1] Melakukan implementasi sistem SPBE dari hasil kegiatan konsultasi anggaran SPBE dengan Pusdatin
- [2] Mengumpulkan bukti dukung implementasi SPBE
- 3.Bulan September

Telah dilakukan kompilasi bukti dukung penerapan SPBE sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Tingkat Penerapan SPBE diantaranya adalah sebagai berikut:

- Reviu pembangunan aplikasi SPBE telah dilaksanakan
- Reviu tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Kemenperin
- Reviu Manajemen Aset TIK (SPBE) telah dilaksanakan
- Reviu Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE telah dilaksanakan
- Reviu Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan
- Reviu Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilaksanakan
- Reviu Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik

Dari hasil self assement sesuai LKE tingkat penerapan SPBE diperoleh nilai sebesar 65,75.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Pemenuhan bukti dukung dalam pengisian LKE SPBE belum ada panduan baku berupa juknis yang memudahkan dalam penyusunan bukti dukung implementasi SPBE.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal terkait pemenuhan bukti dukung SPBE.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya melakukan diskusi, bimbingan serta mengikuti kegiatan yang terkait SPBE dengan Pusdatin dalam rangka memahami pemenuhan bukti dukung pada pengisisn LKE.



3) Indikator Kinerja Sasaran 4.3. : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja

Pada triwulan III target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi 75 %.

Adapun rencana kegiatan triwulan III adalah

- 1. Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi.
- 2. Update website secara berkala
- 3. Update Medsos secara berkala dan setiap saat
- 4. Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat.
- 5. Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan public.
- 6. Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

- ✓ Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya
- ✓ Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar
- ✓ Memutakhirkan konten SIPPN dan website
- ✓ Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik)
- ✓ Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada pelanggan
- ✓ Menindaklanjuti keluhan pelanggan/ pengaduan/ saran dan masukan yang muncul dari pelayanan
- ✓ Memutakhirkan bahan tayang cetak
- ✓ Mengikuti pameran 3rd POMI 2025 pada tanggal 8-10 Juli 2025.
- ✓ Mengikuti pameran AIGIS pada 20-22 Agustus 2025



- ✓ Mengikuti pameran Indonesia 4.0 Conference & Expo 2025 pada tanggal 17-18 September 2025
- ✓ Mengikuti pameran Halal Expo 2025 pada tanggal 25-28 September 2025
- ✓ Monitoring dan evaluasi standar pelayanan publik tanggal 30 September 2025 Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Saat ini telah diupayakan penyebaran kuesioner yang kembali ke BBSPJPPI melalui pengisian di sindii sebelum unduh LHU mandiri. Akan tetapi, masih terdapat kendala teknis sehingga belum bisa diterapkan

c. Rekomendasi

Dilakukan pembenahan modul di SINDIII.

F. Sasaran Kegiatan 5 : Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien

Tabel 15. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 5 Triwulan III TA 2025

	Sasaran	Indikator				Fisik		Kegia	tan Sampai triwulan III
No	Kegiatan	Kinerja	Target	Realis asi	Capaian	Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Tercapainya	1.	50 Persen	-	-	85	85	1] Penyiapan	B7-B9:
	Pengawasan	Rekomendasi						dokumen	1.Penyiapan data dan dokumen
	Internal Yang	hasil						kelengkapan	keperluan audit yang dibutuhkan
	Efektif dan	pengawasan						pelaksanaan audit	pada pelaksanaan audit kinerja sesuai
	Efisien	internal telah						kinerja.	daftar dalam ND Inspektur III Nomor
		ditindaklanjut						2] Koordinasi dan	151/IJ-IND.4/PW/VII/2025.
		i oleh satker						fasilitasi	2.Fasilitasi pelaksanaan audit kinerja
								pelaksanaan audit	oleh Tim Auditor Inspektorat pada
								kinerja dengan Tim	14-18 Juli 2025.
								Auditor Itjen.	3.Penyusunan Matriks Rencana Aksi
								3] Penyusunan dan	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada
								penyampaian	Satker BBSPJPPI.
								rencana aksi tindak	4.Koordinasi tindak lanjut
								lanjut hasil	penyelesaian hasil pengawasan
								pengawasan.	dengan masing-masing penanggung
								4] Koordinasi	jawab tindak lanjut.
								penyiapan dan	
								penyampaian	
								dokumen tindak	
								lanjut hasil	

LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2025



	Sasaran	Indikator				Fisik	(%)	Kegia	tan Sampai triwulan III
No	Kegiatan	Kinerja	Target	Realis asi	Capaian	Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91,84 nilai	-	<u>-</u>	75	75	pengawasan. 5] Koordinasi dengan Tim Auditor Irjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III. 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta	B7-B9: 1] Pengendalian naskah dinas,penggunaan arsip,pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip Bulan Julis d Bulan September. 2] Pemenuhan data dukung dan verifikasi lapangan pengawasan kearsipan internal TA 2024 3] Pelaksanaan verifikasi lapangan pengawasan kearsipan internal oleh Biro umum tanggal 17 September 2025.



Pada Sasaran Kegiatan 5 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1) Indikator Kinerja Sasaran 5.1 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada triwulan III TA 2025 target fisik dari indikator ini 85 % dengan realisasi 85 %. Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan III adalah:

- 1] Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja.
- 2] Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen.
- 3] Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan.
- 4] Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan.
- 5] Koordinasi dengan Tim Auditor Irjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- Penyiapan data dan dokumen keperluan audit yang dibutuhkan pada pelaksanaan audit kinerja sesuai daftar yang disampaikan dalam Nota Dinas Inspektur III Nomor 151/IJ-IND.4/PW/VII/2025
- 2. Fasilitasi pelaksanaan audit kinerja pada satker BBSPJPPI oleh Tim Auditor Inspektorat III pada 14 sd 18 Juli 2025
- 3. Koordinasi dengan Tim Auditor terkait pembahasan matriks daftar temuan hasil audit kinerja pada satker BBSPJPPI
- 4. Penyusunan Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satker BBSPJPPI
- 5. Penyiapan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan (Instruksi KPA, surat teguran KPA)
- 6. Koordinasi tindak lanjut penyelesaian hasil pengawasan dengan masing-masing Penanggung Jawab Tindak Lanjut.



7. Monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada masing-masing Penanggung Jawab.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Masih terdapat beberapa tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi, antara lain:

- a. Perbaikan laporan kegiatan Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi tahun 2024.
- b. Partisipasi personil SPI BLU pada diklat/ pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi terkait audit/pengawasan di bidang keuangan/akuntansi.
- c. Penyelesaian piutang jasa layanan an PT. Tekstil Industri Palekat.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring dan pengendalian tindak lanjut berjalan kurang efektif.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- 1] Koordinasi dengan masing-masing Penanggung Jawab untuk menindaklanjuti hasil temuan sesuai rekomendasi
- 2] Monitoring penyelesaian tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi
- 3] Penyampaian dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada satker BBSPJPPI dengan pihak Inspektorat Jenderal sesuai batas waktu yang ditetapkan.

2) Indikator Kinerja Sasaran 5.2 : Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan).

Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal merupakan standar terendah yang harus dicapai oleh unit kearsipan dalam memastikan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup aspek tata kelola arsip, kepatuhan terhadap prosedur, serta efektivitas sistem kearsipan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi administrasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pengelolaan arsip agar tetap tertib, aman, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Terkait penilaian nilai pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) terjadi perubahan indikator dalam penilaiannya dan akan berlaku setelah renstra 2025-2029 disahkan. Selain hal tersebut juga merubah target dari perjanjian kinerjanya.



a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja

Pada Triwulan III target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi capaian sebesar 75 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan III meliputi:

- 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III.
- 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan sampai triwulan III yaitu:

- 1. Bulan Juli
 - 1] Pengendalian Naskah Dinas:
 - Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 112
 - Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 269
 - 2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 6
 - 3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip, Pembuatan Daftar Arsip & Alih media)
 - Daftar Arsip Aktif = 269
 - Daftar Arsip In Aktif = 168
 - Alih media Arsip Dinamis = 221
 - 4] Penyusutan Arsip:
 - Pembuatan Daftar Usul Pindah = 14 berkas (210 isi berkas)
 - Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 95
 - 5] Peningkatan kompetensi Arsiparis (Diklat/Bimteks/Workshop/Semnas, dll)
 - 6) Pemenuhan data dukung & Verifikasi lapangan pengawasan kearsipan internal TA 2024
- 2. Bulan Agustus
 - 1] Pengendalian Naskah Dinas:
 - Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 93
 - Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 337
 - 2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 3
 - 3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip, Pembuatan Daftar Arsip & Alih media)
 - Daftar Arsip Aktif = 35 berkas (522 arsip)



- Alih media Arsip Dinamis = 8 berkas (134 arsip)
- 4] Penyusutan Arsip:
 - Pembuatan Daftar Usul Pindah = 20 berkas (290 isi berkas)
 - Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 94
- 5) Pemenuhan data dukung & Verifikasi lapangan pengawasan kearsipan internal TA 2024
- 3. Bulan September
 - 1] Pengendalian Naskah Dinas:
 - Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 127
 - Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 384
 - 2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 2
 - 3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip, Pembuatan Daftar Arsip & Alih media)
 - Daftar Arsip Aktif = 34 berkas (516 arsip)
 - Alih media Arsip Dinamis = 14 berkas (425 item arsip)
 - 4] Penyusutan Arsip:
 - Pembuatan Daftar Usul Pindah = 7 berkas (253 isi berkas)
 - Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 72
 - 5) Pelaksanaan pengawasan kearsiapan
 - 6] Peningkatan kompetensi Arsiparis (Diklat/Bimteks/Workshop/Semnas, dll) Dari data diatas,
- 7] Telah dilaksanakan verifikasi lapangan pengawasan kearsipan pada tanggal 17 September 2025 dengan nilai sementara sebesar 86,47.

perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

- 1] Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk di Srikandi agak terlambat.
- 2] Anggaran yang terbatas untuk peningkatan kapabilitas SDM kearsipan

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pada unit kearsipan BBSPJPPI telah dijalankan diantaranya dengan telah dilakukannya upaya pengendalian



naskah dinamis, pengelolaan terkait penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kompetensi SDM khususnya menyangkut pengoperasian aplikasi persuratan Srikandi dalam mendukung pencapaian target pengawasan kearsipan internal Rencana perbaikan untuk triwulan selanjutnya adalah penyesuaian pedoman dan target kinerja kearsipan, serta perlu koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI.

G. Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Tabel 16. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 6 triwulan III TA 2025

	Sasaran	Indikator			Capaian	Fisi	k (%)	Kegiatan	Sampai triwulan III
No	Kegiatan	Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Terwujudnya	1. Nilai	82 nilai	83,60	101.95	50%	50%	1] Pelaksanaan monev	B7-B9:
	akuntabilitas	minimal						kinerja dan	1. Pengumpulan dan updating
	organisasi	Sistem						penyusunan dokumen	data capaian target indikator
		Akuntabilitas						akuntabilitas kinerja	kinerja Perkin Juli sd
		Instansi						tahun berjalan (PP 39	September 2025
		Pemerintah						Tw III)	2. Pengisian dan updating
		(SAKIP)							data capaian rencana aksi
		Satker							Perkin Bulan Juli sd
									September 2025.
									3. Pengisian dan Updating
									data capaian kinerja Juli sd
									September 2025
		2. Nilai	94 nilai	100 nilai	106,38	75%	75%	1] Membuat rencana	B7-B9:
		minimal						penarikan dana	1] Koordinasi dengan tim
		Indikator						bulanan triwulan III	pengelola terkait usulan RPD
		Kinerja						dan melakukan revisi	sd Triwulan III.
		Pelaksanaan						pemutakhiran RPD	2] Pengajuan usulan revisi
		Anggran						Halaman III DIPA	pemutakhiran RPD Hal III DIPA
		IKPA						2] Melakukan	TW III 2025 ke Kanwil Ditjen
								monitoring dan	Perbendaharaan.
								evaluasi pelaksanaan	3] Koordinasi dengan tim
								realisasi belanja	pengelola terkait usulan RPD
								3} Pengajuan SPM	sd Triwulan III.
								tepat waktu sesuai	
								ketentuan TW III	



Pada Sasaran Kegiatan 6 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1) Indikator Kinerja Sasaran 6.1 : Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian terhadap seluruh satker di lingkungan Kemenperin, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Pada tahun 2025, pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SAKIP 2024 dengan mengacu pada ketentuan PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021.

a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja

Pelaksanaan rencana kegiatan yang mendukung pada upaya perwujudan akuntabilitas kinerja satker BBSPJPPI selama periode Triwulan III 2025 diantaranya melalui penyiapan dokumen pengukuran kinerja tahun berjalan, penyusunan dokumen perencanaan kinerja untuk mendukung proses penganggaran periode tahun berikutnya, proses pelaporan kinerja Triwulan III serta evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja periode tahun sebelumnya.

Pada Triwulan III target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi capaian sebesar 75 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan III meliputi:

1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III)

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- Penyusunan dan penyampaian dokumen Laporan PP 39 Triwulan II 2025 sesuai Nota DInas Kepala BBSPJPPI Nomor 101/BBSPJPPI/PR/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025
- Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin Juli sd September 2025
- Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin bulan Juli sd September 2025



- Pengisian dan updating data capaian kinerja bulan Juli sd September 2025 pada aplikasi eMonev
 Bappenas
- Penyusunan dan penyampaian Laporan PP 39 Tw III tahun 2025 sesuai batas waktu

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Tidak ada kendala

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya koordinasi dan monitoring pimpinan puncak terkait capaian perkin yang masih belum tercapai.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah terkait dengan penyampaian Laporan PP 39 TW III 2025 sebelum batas waktu yang ditentukan.

2) Indikator Kinerja Sasaran 6.2 : Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Satker.

Nilai minimal IKPA merupakan ambang batas terendah yang harus dicapai oleh satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKPA sendiri digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran berbasis aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran mendukung pencapaian output yang optimal serta menghindari potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara.

a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja

Pada Triwulan III target fisik dari indikator ini adalah 75 % dengan realisasi capaian sebesar 75 %.

- Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan III meliputi:
- 1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA
- 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja
- 3} Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan
- 4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.



Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- ✓ Koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI terkait usulan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) sd Triwulan III 2025
- ✓ Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw III 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng sesuai surat KPA BBSPJPPI Nomor S-99/BBSPJPPI/PR/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 7 Juli 2025.
- ✓ Permintaan usulan kepada Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI terkait penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan IV 2025 sesuai ND Kapokja Program Pelaporan Nomor 13/BBSPJPPI/TU.1/IX/2025 tanggal 25 September 2025.
- ✓ Menginput realisasi capaian output Juli-September 2025 tepat waktu Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Belum terdapat kejelasan pengajuan dan persetujuan usulan relaksasi blokir kode A tahap III yang akan dikoordinir Set BSKJI

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berkenaan dengan pemenuhan aspek penilaian IKPA terkait kualitas perencanaan anggaran, telah dilakukan proses pemutakhiran RPD hal III DIPA pada Triwulan III 2025 sesuai batas waktu ketentuan yang ditetapkan.

Rencana perbaikan untuk triwulan selanjutnya diantaranya:

- ✓ Koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI terkait penyesuaian data Rencana Penarikan Dana (RPD) sd Triwulan IV 2025
- ✓ Penyampaian usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw IV 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng sebelum batas waktu yang ditentukan.



H. Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Tabel 17. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 7 triwulan III TA 2025

	Sasaran	Indikator				Fisi	k (%)	Kegiatan S	Sampai triwulan III
No	Kegiatan	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Meningkatny	Persentase	53 %	54,12 %	102,11 %	75	75	1] Mengutamakan	B7-B9 :
	a	penggunaan						pembelian produk	1.Melaksanakan proses
	penggunaan	Produk		(Data				dalam negeri dalam	pengadaan barang/jasa.
	Produk Dalam	Dalam Negeri		perhitunga				proses pengadaan.	2.Melakukan tagging realisasi
	Negeri dalam	dalam		n akun				Pemeriksaan barang-	TKDN pada aplikasi SAKTI.
	rangka	pengadaan		terpilih)				barang berTKDN pada	3TKDN sampai TW III dr
	menunjang	barang						website P3DN	perhitungan akun terpilih
	produktivitas	dam/atau						sebelum melakukan	sebesar 54,12%
	Industri	jasa						pembelian/pengadaan	
		pemerintah						2] Melakukan tagging	
								realisasi TKDN atas	
								realisasi belanja pada	
								aplikasi SAKTI	
								(dikarenakan emon	
								masih proses	
								pembaharuan)	
								3] Rekapitulasi	
								realisasi penggunaan	
								produk dalam negeri	
								berdasarkan tagging.	

Pada Sasaran Kegiatan 7 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1) Indikator Kinerja Sasaran 7.1 : Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementrian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja Pemerintah. Pemakaian akun belanja yang disepakati bersama ada 14 akun meliputi akun



521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 5251112, 5251113, dan 5251153.

Perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri (R_{P3DN}) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

BBSPJPPI sebagai satker di bawah Kementerian Perindustrian berupaya dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Guna mendukung hal tersebut, telah disusun rencana kinerja yang mendukung pencapaian target penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BBPSJPPI tahun 2024.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah sebagai berikut:

- 1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barangbarang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan
- 2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi SAKTI
- 3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut sd Triwulan III yaitu:

- 1] Melakukan Pengadaan Meja Kubikal Isi 4 dengan menggunakan jasa IKM untuk meningkatkan KDN (Kandungan Dalam Negeri)
- 2] Mengutamakan pengadaan dengan barang-barang bersertifikat TKDN.
- 3] Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri.
- 4] Pembayaran kontrak bulan Januari-September 2025 tenaga outsourching: Petugas Kebersihan, Tenaga Keamanan, dan Pengemudi.
- 5] Melakukan Pengadaan Bahan Penolong yang memiliki TKDN.

Berdasarkan monitoring capaian realisasi TKDN BBSPJPPI periode Januari-September berdasarkan data tagging realisasi TKDN pada akun terpilih diperoleh data capaian sebesar 54,12 %.

Dari data di atas, perbandingan realisasi dan target maka berhasil dilaksanakan.



b. Kendala

- 1] Keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri.
- 2] Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah saat ini masih terkendala dengan adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan efisiensi anggaran TA 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- 1] Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN.
- 2] Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend.

3.1.2 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang didalamnya mencakup pelaksanaan/operasional pemberian jasa layanan kepada masyarakat khususnya industri meliputi penyelenggaraan jasa pelayanan teknis pengujian, pelayanan teknis kalibrasi, pelayanan teknis sertifikasi, pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis, pelayanan inspeksi teknis, pelayanan optimasi pemanfaatan teknologi, pengadaan peralatan fasilitas Laboratorium/workshop/layanan, Sosialisasi dan diseminasi serta fasilitasi dan pembinaan industri.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan/operasional layanan seperti diantaranya belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan layanan (sampling, audit sertifikasi, supervisi kerjasama Optek, bimbingan dan pendampingan teknis dan verifikasi industri), belanja jasa (pemeliharaan akreditasi lembaga Penilaian Kesesuaian, biaya kalibrasi peralatan, pengujian Subkon, sewa kendaraan dalam rangka mobilisasi peralatan untuk sampling, transport Limbah B3) serta belanja barang dan barang persediaan (pembelian



bahan kimia dan bahan penolong, pengadaan peralatan gelas, perlengkapan sampling, penggantian sparepart peralatan dll).

Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu AEF (Sosialisasi dan Diseminasi) , BAD (Pelayanan Publik kepada industri) dan CAH (Sarana Bidang Industri dan Perdagangan).

- AEF (Sosialisasi dan Diseminasi)
 - Untuk indikator kinerja ini, realisasi capaian masih rendah dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres I Tahun 2025 yang mengatur pembatasan kegiatan di luar kantor sehingga pelaksanaan kegiatan Business Gathering masih belum dapat terlaksana.
- BAD (Pelayanan Publik kepada industri)
 Terkait capaian kinerja pelayanan publik kepada industri, sampai Triwulan III masih dalam progress yang baik (capaian lebih dari 75%).
- CAH (Sarana Bidang Industri dan Perdagangan)
 Terkait pengadaan sampai Triwulan III sudah terlaksana dengan baik tetapi masih terkendala adanya blokir efisiensi anggaran (Kode A) untuk belanja modal peralatan uji dan peralatan pendukung laboratorium serta sarana ruang pelayanan.

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Dukungan Manajemen yang didalamnya mencakup pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan sarana prasarana, perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja, pengelolaan pelayanan publik, pengembangan sistem informasi serta pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja keperluan perkantoran, belanja gaji dan honor (operasional satuan kerja, honor output kegiatan, honorarium karyawan kontrak) belanja barang persediaan (pengadaan ATK dan perlengakapan rumah tangga perkantoran), biaya langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet), perjalanan dinas (perjadin pimpinan), belanja pemeliharaan sarpras, belanja jasa (pemeliharaan SMM balai, maintenance jaringan, biaya pelatihan teknis SDM) serta belanja modal (pengadaan sarpras



perkantoran, pengembangan sistem informasi, pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan).

Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri terdiri dari 4 indikator kinerja kegiatan yaitu

- EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
 Pada Indikator kinerja kegiatan ini terdiri dari layanan hubungan masyarakat dan informasi ,
 layanan umum dan layanan perkantoran. Dimana ketiga layanan ini sudah berjalan dengan baik.
- EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 Layanan sarana internal sampai triwulan III sudah berjalan dengan baik.
- EBC Layanan Manajemen SDM Internal
 Terdiri dari layanan manajemen SDM dan Layanan Pendidikan dan pelatihan. Dimana layanan tersebut berjalan dengan baik.
- EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
 Terdiri dari 4 layanan yaitu layanan perencanaan dan penganggaran ; layanan pemantauan dan evaluasi ; layanan manajemen keuangan dan layanan reformasi kinerja. Sampai dengan Triwulan III sudah berjalan dengan baik.

3.1.3 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Monitoring Rincian Output Bulanan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA BBSPJPPI TA 2025 sampai dengan Triwulan III 2025, capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik Kegiatan pada Triwulan III TA. 2025 dengan mengacu pada aplikasi SMART Kemenkeu. Capaian realisasi keuangan berdasar pagu efektif sebesar 72,30 % sedangkan target capaian realisasi keuangan sebesar 66,97 %. Untuk capaian fisik yang ditetapkan BSKJI sebesar 75 % dengan capaian realisasi fisik TW III sebesar 75,88%. Secara lebih jelas capaian realisasi untuk masing-masing kegiatan sebagaimana berikut:

a. Kegiatan I: Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 18.Kegiatan I realisasi fisik dan keuangan

			%				J	uli	Agı	ustus	Septe	ember
KRO	RO	Pagu Efektif	Realisasi Keuangan s/d Septemb er	TVR O	RVR O	Prog res	RV RO	Prog res	RV RO	Prog res	RV RO	Prog res
AEF Sosialis asi dan Disemin asi	013 - Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri)	329.675. 000	11,73	150 oran g	0	50	0	10	0	10	0	10
	002 - Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	7.885.99 9.000	53,37	480 indu stri	326 indu stri	74,9 7%	26	8.33	28	8.33	20	8.33
BAD Pelayan an publik kepada	022 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	475.736. 000	28,02	30 indu stri	29 indu stri	74,9 7%	7	8.33	4	8.33	0	8.33
industri Prasara na Internal	034 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	940.140. 000	33,90	240 indu stri	197 indu stri	74,9 7%	9	8.33	33	8.33	22	8.33
	055 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	217.110. 000	23,59	5 indu stri	4 indu stri	74,9 7%	0	8.33	0	8.33	0	8.33
	056 - Jasa pelayanan inspeksi teknis Pencegahan Pencemaran Industri	28.668.0 00	70.50	10 indu stri	9 indu stri	93%	0	3	0	3	0	3
	057 - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri	927.144. 000	15,86	18 indu stri	5 indu stri	74,9 7%	0	8.33	0	8.33	0	8.33



			%				J	uli	Agı	ustus	Septe	ember
KRO	RO	Pagu Efektif	Realisasi Keuangan s/d Septemb er	TVR O	RVR O	Prog res	RV RO	Prog res	RV RO	Prog res	RV RO	Prog res
	096 - Jasa	155.668.	19,36	15	10	74,9	2	8.33	0	8.33	1	8.33
	Pelayanan Teknis Uji	000		indu	indu	7%						
	Profisiensi			stri	stri							
	Pencegahan											
	Pencemaran											
	Industri											
CAH	013 - Peralatan	1.753.57	81,93	38	4	70%	0	5	2	5	0	5
Sarana	fasilitas	0.000		unit	unit							
Bidang	laboratorium/works											
Industri	hop/layanan											
dan	Pencegahan											
Perdaga	Pencemaran											
ngan	Industri											
Total	Target Keuangan	Rp.	50,22%									
	BSKJI	12.713.7	Rp.6.384.6									
	72,30%	10.000	36.761									

(Sumber: Aplikasi SAKTI)

Sampai Triwulan III Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri realisasi keuangan sebesar 50,22 % tidak mencapai target keuangan BSKJI.

a) Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri memiliki 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari:

1. KRO 6077.AEF Sosialisasi dan Diseminasi

Pada KRO Sosialisasi dan Diseminasi terdiri dari satu RO Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri.

Sampai Triwulan III, total realisasi keuangan 11,73%, tidak mencapai sasaran.

Untuk realisasi dan progress capaian output RO sd Triwulan III masih belum tercapai karena masih belum terlaksanannya kegiatan business gathering. Dimana rencana kegiatan tersebut direncanakan akan dilakukan di triwulan IV.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah:

- Pembuatan draft desain pemutakhiran company profile, brosur-brosur layanan.
- Pembuatan jadwal konten media sosial
- Pencetakan bahan-bahan promosi (company profile, brosur,dll) untuk bahan promosi dan



pameran; pengunggahan e-book di media elektronik dan media online; pengunggahan konten media sosial secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- Mengikuti pameran 3rd POMI 2025 pada tanggal 8-10 Juli 2025.
- Mengikuti pameran AIGIS pada 20-22 Agustus 2025
- Mengikuti pameran Indonesia 4.0 Conference & Expo 2025 pada tanggal 17-18 September 2025.
- Mengikuti pameran Halal Expo 2025 pada tanggal 25-28 September 2025.
- 2. KRO 6077.BAD Pelayanan Publik kepada industri

Pada KRO Pelayanan Publik kepada industri terdiri dari 7 RO.

Sampai Triwulan III, total realisasi keuangan mencapai 46,18%, tidak mencapai sasaran.

Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya sudah tercapai dikarenakan dari target 798 industri sudah tercapai 583 industri yaitu sebesar 73,06 %.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah:

- Pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan kerjasama pemantauan lingkungan.
- Pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel untuk pengujian air limbah, udara emisi, dan produk (dalam rangka penerbitan SPPT SNI).
- Pelaksanaan pengujian subkon untuk parameter pengujian yang belum dapat dilakukan di laboratorium BBSPJPPI
- Pengadaan bahan kimia, bahan penolong, sparepart untuk mendukung operasional layanan pengujian.
- Pelaksanaan audit sertifikasi dalam rangka penerbitan SPPT SNI, sertifikat industri hijau dan sertifikat sistem mutu, pelaksanaan layanan kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis SDM industri, serta supervisi dalam rangka pelaksanaan kerjasama optimalisasi pemanfaatan teknologi.
- 3. KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Pada KRO Sarana Bidang Industri dan Perdagangan terdiri dari satu RO.

Sampai Triwulan III, realisasi keuangan sebesar 81,93%, mencapai sasaran.

Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya telah tercapai.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah:

 Pengadaan 2 alat yaitu portable high performance Zero air system dan portable gas calibrator.



• Pengadaan 2 pHmeter Hanna Instruments

b) Kendala

- 1. KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi
 - Adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres I Tahun 2025 yang mengatur pembatasan kegiatan di luar kantor sehingga pelaksanaan kegiatan Business Gathering masih belum dapat terlaksana.
- 2. KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
 - Masih adanya blokir efisiensi anggaran (Kode A) untuk belanja modal peralatan uji dan peralatan pendukung laboratorium serta sarana ruang pelayanan

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan triwulan ini adalah perlu dilakukan peninjauan ulang atas jadwal pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan sekaligus melakukan percepatan pertanggungjawaban keuangan atas realisasi kegiatan yang sudah dijalankan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

- Penjajakan peluang pelaksanaan kegiatan Business Gathering secara daring. Segera melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan sekiranya kegiatan sudah terjadwal.
- Segera melakukan penjadwalan ulang atas pelaksanaan pengadaan dan perubahan rencana penarikan anggaran untuk belanja modal peralatan uji dan peralatan pendukung laboratorium yang anggaran tidak terblokir dan belum terlaksana. Dan selanjutnya segera melakukan proses pertanggung jawaban keuangan setelah dilakukan proses serah terima pekerjaan dengan pihak Penyedia.

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 19: Kegiatan II Realisasi Fisik dan Keuangan

		Pagu	% Realisasi				J	uli	Ag	ustus	Sept	ember
KRO	RO	Efektif (Rp)	Keuangan s/d September	TVRO	RVRO	Prog res	RV RO	Prog res	RV RO	Prog res	RV RO	Prog res
EBA Layanan Dukung an Manaje men Internal	958 Layanan Hubunga n Masyarak at dan Informasi (Layanan)	103.528.0 00	28,14	1 layana n	0	74,97	0	8.33	0	8.33	0	8.33
	962 - Layanan Umum	73.958.00 0	12,13	1 layana n	0	74,97	0	8.33	0	8.33	0	8.33
	994 - Layanan Perkantor an	19.422.63 4.00	78,78	1 layana n	0	74,97	0	8.33	0	8.33	0	8.33
EBB Layanan Sarana dan Prasara na Internal	951 - Layanan Sarana Internal	201.735.0	97,61	90 unit	39 unit	50	3	10	6	5	0	5
EBC Layanan	954 - Layanan Manajem en SDM	53.188.00 0	2,26	107 orang	81 orang	74,97	9	8.33	9	8.33	9	8.33
Manaje men SDM Internal	996 - Layanan Pendidika n dan Pelatihan	353.330.0 00	48,03	55 orang	54 orang	76	0	8	3	8	3	8
EBD Layanan Manaje men Kinerja Internal	952 - Layanan Perencan aan dan Pengangg aran	45.906.00 0	0%	2 doku men	1	74,97	0	8.33	0	8.33	0	8.33
Industri	953 - Layanan Pemantau	44.061.00 0	0,68	2 doku men	1 doku men	74,97	0	8.33	0	8.33	0	8.33



		Pagu	% Realisasi				J	uli	Agı	ustus	Sept	ember
KRO	RO	Efektif (Rp)	Keuangan s/d September	TVRO	RVRO	Prog res	RV RO	Prog res	RV RO	Prog res	RV RO	Prog res
	an dan Evaluasi											
	955 - Layanan Manajem en Keuangan	106.892.0 00	85,36	2 doku men	1 doku men	74,97	0	8.33	0	22,33	0	8.33
	961 - Layanan Reformasi Kinerja	6.115.000	9,85	2 doku men	0	74,97	0	8.33	0	8.33	0	8.33
Total	Target Keuangan 72,30%	Rp. 20.411.34 7.000	77,41 % Rp.15.799.7 33.920									

(Sumber Aplikasi SAKTI)

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebesar 77,41% diatas dari target keuangan BSKJI.

a. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

1. KRO 6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari satu RO.

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan sebesar 78,26 %, telah mencapai sasaran.

Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya sudah terlaksana tetapi pada capaian output dIIsi di akhir tahun (Desember).

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Pembayaran gaji dan tunjangan ASN, pembayaran biaya langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarpras perkantoran (gedung dan bangunan kantor, kendaraan operasional, alat laboratorium), pengadaan bahan makanan penambah daya tahan tubuh, penyelenggaraan poliklinik, pengelolaan jaringan data, Mapping Kebutuhan Sistem Informasi yg diperlukan tiap Bagian
- Finalisasi Kebutuhan Sistem Informasi dan Perbaikan sistem yang sudah berjalan.



2. KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdiri dari 1 RO.

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan sebesar 97,61%, telah mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah realisasi pekerjaaan pengadaan sarana perkantoran meliputi:

- Pengadaan 24 buah kursi kerja
- Pengadaan 6 buah meja kubikal isi 4.
- Pengadaan TV 43 inch 2 buah
- Pengadaan TV 55 inch 1 buah
- Pengadaan AC 6 buah
- 3. KRO 6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

Pada KRO Layanan Manajemen SDM Internal terdiri dari dua RO.

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan sebesar 42,04%, tidak mencapai sasaran.

Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya sudah tercapai

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Koordinasi administrasi kepegawaian.
- Menyusun Rencana Pelatihan Teknis 2025 dan Koordinasi dengan PIC penyelenggaraan Diklat
- Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Bekerja di Ketinggian & AK3 Ruang terbatas kerjasama dengan ESACO), narasumber workshop Bimtek Kearsipan kepegawaian.
- 4. KRO 6042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal terdiri dari 4 RO.

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan sebesar 45,40%, tidak mencapai sasaran.

Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya tercapai dikarenakan tercapai di semester I dan akhir tahun.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Penyusunanan dan penyampaian Laporan triwulan PP 39 TW I dan II 2025 sesuai batas waktu.
- Pelaksanaan reviu RKA-KL TA 2026
- Pelaksanaan audit laporan keuangan BLU oleh Kantor Akuntan Publik



Perjalanan dinas dalam rangka workshop penyusunan laporan keuangan dan BMN

b. Kendala

- 1. KRO 6042 EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - Potensi kekurangan belanja pegawai yang disebabkan adanya tambahan pegawai CPNS dan PPPK yang mulai aktif di tahun 2025.
- 2. KRO 6042 EBC Layanan Manajemen SDM Internal
 - Adanya blokir efisiensi anggaran pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni sehingga volume pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM internal menjadi terbatas
 - Realisasi perjadin dalam rangka diklat Latsar CPNS tidak terealisasi dikarenakan anggaran perjadin menggunakan anggaran BPSDMI.
- 3. KRO 6042 EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - Realisasi anggaran pada kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja yang masih rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan koordinasi monev kinerja di lingkungan internal BSKJI sebagian besar dilaksanakan secara online.

c. Tindak Lanjut

Apabila diproyeksikan terdapat anggaran pada komponen kegiatan Layanan Manajemen Kinerja yang tidak terealisasi akan dilakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang membutuhkan tambahan alokasi anggaran untuk mendorong optimalisasi penyerapan anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

- a. Terkait dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Net Promoter Score (NPS) terdapat kendala masih rendahnya partisipasi pelanggan dalam pengisian kuesioner (pengisisan dan pengembalian kuesioner oleh pelanggan jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah kuesioner yang disebar).
- b. Terkait indikator kinerja persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) terdapat kendala belum tersedianya sistem untuk memonitoring penyelesaian pekerjaan untuk seluruh layanan.
- c. Terkait dengan sasaran kegiatan terwujudnya SDM yang profesional dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) terdapat kendala yaitu belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2025 dari LAN, belum ada informasi jadwal penyelenggaraan



Pelatihan Fungsional tahun 2025 dari Instansi Pembina yang dibutuhkan JF terkait, Efisiensi Anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM berkurang, Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshoot)

- d. Terkait dengan sasaran kegiatan penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik dengan indikator persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI terdapat kendala yaitu belum adanya update manual dan sistem pada SIPPT BSKJI yang belum dapat memberikan umpan balik jika terjadi kegagalan pengiriman dari SINDIi sehingga mengakibatkan selisih data perhitungan layanan pengujian dan kalibrasi.
- e. Terkait dengan indikator kinerja tingkat penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) terdapat kendala dalam pemenuhan bukti dukung dalam pengisian LKE SPBE dikarenakan belum adanya panduan baku berupa juknis yang memudahkan dalam penyusunan bukti dukung implementasi SPBE.
- f. Terkait rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker terdapat kendala beberapa tindak lanjut yg masih belum sesuai rekomendasi seperti laporan sertifikasi, partisipasi personil SPI BLU pada diklat/pelatihan serta penyelesaian piutang jasa layanan an PT tekstil Industri Palekat.
- g. Terkait dengan sasaran kegiatan tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) terdapat kendala yaitu Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk melalui Srikandi agak terlambat. Disamping itu, belum semua SDM yang terkait kearsipan telah memahami penggunaan aplikasi Srikandi khususnya untuk surat keluar.
- h. Terkait dengan sasaran kegiatan meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri dengan indikator persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah terdapat kendala yaitu keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri serta masih adanya blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.



3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077).

Terkait KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi terdapat kendala:

 Adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres I Tahun 2025 yang mengatur pembatasan kegiatan di luar kantor sehingga pelaksanaan kegiatan Business Gathering masih belum dapat terlaksana.

Terkait KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

- Realisasi belanja modal sd TW III masih terkendala ada blokir efisiensi belanja (Kode A), dimana pengajuan relaksasi tahap II atas blokir belanja modal tidak mendapatkan persetujuan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu
- b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042)

Terkait KRO 6042 EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Potensi kekurangan belanja pegawai yang disebabkan adanya tambahan pegawai CPNS dan
 PPPK yang mulai aktif di tahun 2025

Terkait KRO 6042 EBC Layanan Manajemen SDM Internal

- Adanya blokir efisiensi anggaran pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni sehingga volume pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM internal menjadi terbatas
- Realisasi perjadin dalam rangka diklat Latsar CPNS tidak terrealisasi dikarenakan anggaran perjadin menggunakan anggaran BPSDMI.

Terkait KRO 6042 EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

 Realisasi anggaran pada kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja yang masih rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan koordinasi monev kinerja di lingkungan internal BSKJI sebagian besar dilaksanakan secara online.



3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT

3.3.1 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian kinerja triwulan III TA 2025 yang utama selanjutnya sebagai berikut:

- 1. Untuk meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Net Promoter Score (NPS), diperlukan strategi intensif dalam menghimpun isian kuesioner. Strategi tersebut antara lain dengan dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran serta pada sistem SINDI dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU.
- 2. Terkait persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement dengan cara memonitoring proses layanan pengujian jika ada keterlambatan segera diselesaikan dan memberitahukan informasi tersebut kepada pelanggan. Disamping itu, untuk mendukung kelancaran operasional layanan pengujian agar turut dilakukan upaya pemeliharaan mesin peralatan berkala, evaluasi ketersediaan stock bahan kimia dan sparepart secara berkala serta pengaturan jadwal sampling bagi analis yang juga bertugas sebagai petugas PPC.
- 3. Terkait indikator kinerja IP ASN perlu mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi serta mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai.
- 4. Terkait indikator kinerja Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI perlu dilakukan konsultasi dengan admin SIPPT BSKJI melalui forum grup integrasi data BSJKI agar dapat memberikan solusi untuk pengiriman data yang tertunda atau tidak dapat di terima pada sisi server SIPPT.
- 5. Terkait indikator kinerja tingkat penerapan SPBE perlu dilakukan diskusi, bimbingan serta mengikuti kegiatan yang terkait SPBE dengan Pusdatin dalam rangka memahami pemenuhan bukti dukung pada pengisisn LKE.
- 6. Terkait rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker diperlukan koordinasi masing masing penenggungjawab untuk menindaklanjuti temuan, monitoring penyelesaian tindak lanjut yg belum sesuai rekomendasi serta menyampaikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan pihak inspektorat jenderal sesuai batas waktu yang ditetapkan.



- 7. Terkait nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) perlu koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI
- 8. Terkait dengan pengukuran indikator persentase penggunaan produk dalam negeri, perlu dilakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN serta Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend.

3.3.2 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

- a. Kegiatan I: Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077).
 - Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan triwulan ini adalah perlu dilakukan peninjauan ulang atas jadwal pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan sekaligus melakukan percepatan pertanggungjawaban keuangan atas realisasi kegiatan yang sudah dijalankan.
 - Terkait KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi terdapat rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah:
 - Penjajakan peluang pelaksanaan kegiatan Business Gathering secara daring. Segera melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan sekiranya kegiatan sudah terjadwal. Koordinasi awal untuk persiapan pelaksanaan Business Gathering terkait penunjukan panitia pelaksana, penentuan tema pelaksanaan kegiatan, rundown acara serta Narasumber pada pelaksanaan kegiatan

Terkait KRO 6077 CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

- Segera melakukan penjadwalan ulang atas pelaksanaan pengadaan dan perubahan rencana penarikan anggaran untuk belanja modal peralatan uji dan peralatan pendukung laboratorium yang anggaran tidak terblokir dan belum terlaksana. Dan selanjutnya segera melakukan proses pertanggung jawaban keuangan setelah dilakukan proses serah terima pekerjaan dengan pihak Penyedia
- b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042)
 - Apabila diproyeksikan terdapat anggaran kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis ASN, Pendidikan dan pelatihan teknis serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi / Zona Integritas /SPIP yang tidak terrealisasi akan dilakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang membutuhkan tambahan alokasi anggaran.

LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2025



- Monitoring jadwal pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara dan pendaftaran pelaksanaan pelatihan sesuai kompetensi SDM.
- Melakukan monitoring piutang dan penyelesaian tagihan pembayaran piutang atas jasa layanan untuk memperlancar cash flow dan memberi kelonggaran operasional kegiatan yang bersumber dari anggaran PNBP.



BAB. IV PENUTUP

4.1 Realisasi Kegiatan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025, capaian perjanjian kinerja menunjukkan hasil yang positif. Indikator kinerja *Nilai Minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker* telah berhasil melampaui target yang ditetapkan 82,00, dengan capaian nilai sebesar 83,60. Selain itu seluruh indikator kinerja lainnya seperti *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai SLA, Nilai NPS, Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (unit kearsipan), Nilai minimal IKPA serta Persentase penggunaan PDN dalam pengadan barang dan jasa pemerintah* menunjukkan sinyal positif (tercapai 75% di TW III) untuk mencapai target di akhir tahun. Tetapi tetap terus dimonitoring capaiannya agar di akhir tahun semua Indikator Kinerja melebihi target yang terdapat dalam perjanjian kinerja 2025.

Dari sisi pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2025, pengelolaan keuangan BBSPJPPI mengalami beberapa dinamika penting, seperti persetujuan relaksasi blokir kode A tahap II dan penggunaan saldo, serta pelaksanaan penyesuaian anggaran dimana sd Triwulan III 2025 telah dilakukan 10 (sepuluh) kali revisi DIPA. Revisi tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan belanja dengan prioritas kegiatan yang berjalan, sekaligus mengakomodasi perubahan kondisi operasional yang memerlukan penyesuaian cepat dan tepat. Melalui revisi terakhir, ditetapkan adanya penggunaan saldo awal sebesar Rp. 2.788.144.000,- yang kemudian menambah besaran pagu pada DIPA BBSPJPPI TA 2025 menjadi sebesar Rp. 38.947.275.000,- dengan besaran pagu efektif sebesar Rp. 33.125.057.000,-. Pagu efektif tersebut terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 15.731.107.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU tahun berjalan sebesar Rp. 17.393.950.000,-. Namun demikian, masih terdapat dana yang diblokir dengan nilai cukup signifikan, yaitu sebesar Rp. 5.822.218.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 1.742.024.000,- dan PNBP sebesar Rp. 4.080.194.000,-.

Sementara itu, dari aspek kinerja layanan jasa teknis, capaian PNBP hingga akhir Triwulan III menunjukkan hasil yang baik. Realisasi penerimaan mencapai Rp. 14.870.290.922,- atau sekitar 79,58% dari total target penerimaan PNBP tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 18.686.000.000,-. Angka ini mencerminkan kontribusi nyata BBSPJPPI dalam mendorong optimalisasi layanan teknis sebagai salah satu



sumber utama penerimaan negara. Dari sisi penyerapan anggaran, kinerja hingga periode Januari–September 2025 mencapai Rp. 22.184.370.681,- atau 66,97% dari total pagu anggaran efektif. Realisasi tersebut terdiri atas penyerapan RM sebesar Rp. 12.864.093.354,- (81,77%) dan PNBP tahun berjalan sebesar Rp. 9.320.277.327,- (53,58%). Capaian tersebut lebih rendah dari target penyerapan anggaran yang ditetapkan oleh BSKJI yaitu sebesar 72,30%, salah satu faktor penyebabnya adalah adanya revisi DIPA terkait penggunaan saldo awal sebesar Rp. 2.788.144.000,- yang baru disahkan pada tanggal 19 September 2025, sehingga waktu untuk merealisasikannya dalam Triwulan III sangat terbatas. Kendati demikian, dari sisi capaian fisik kegiatan, kinerja BBSPJPPI menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Triwulan III, realisasi fisik telah mencapai 75,88%, melampaui target yang ditetapkan oleh BSKJI yaitu sebesar 75%.

4.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025, BBSPJPPI menghadapi sejumlah hambatan yang berdampak pada pencapaian kinerja, khususnya dalam realisasi keuangan yang belum sepenuhnya mencapai target BSKJI. Salah satu kendala utama adalah adanya revisi pemanfaatan saldo kas BLU sebesar Rp2.788.144.000,- yang menambah pagu dimana pengesahan revisi baru ditetapkan pada tanggal 19 September 2025. Mengingat waktu yang sangat singkat sebelum akhir triwulan, saldo tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal dalam bentuk belanja, sehingga memengaruhi capaian serapan anggaran.

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai jadwal, antara lain anggaran untuk pelaksanaan *Business Gathering*. Adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan diluar kantor menyebabkan pelaksanaan Business Gathering baru direncanakan pada Triwulan IV secara daring, sehingga realisasi pada periode laporan ini belum terlihat. Hal serupa juga terjadi pada anggaran perjalanan dinas Latsar CPNS yang tidak terealisasi karena kebutuhan perjalanan tersebut telah didanai melalui anggaran BPSDMI. Kegiatan lain seperti realisasi perjalanan dinas pada kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal juga rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan secara online. Di samping itu, BBSPJPPI masih menghadapi kendala terkait persetujuan relaksasi anggaran yang masih diblokir khususnya pada pos belanja modal dimana masih terdapat pagu anggaran belanja modal yang terblokir sebesar Rp. 3.084.731.000,-. Kondisi ini turut membatasi ruang gerak dalam optimalisasi serapan anggaran hingga akhir September. Disisi lain, didapati kondisi dimana terdapat potensi kekurangan belanja pegawai pada DIPA BBSPJPPI TA 2025 yang disebabkan adanya tambahan pegawai CPNS dan PPPK yang mulai aktif di tahun 2025



Selain aspek keuangan, terdapat pula kendala yang dapat berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja tertentu. Misalnya, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai *Net Promoter Score (NPS)*, jumlah pengembalian kuesioner yang masuk relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah kuesioner yang disebarkan. Rendahnya tingkat respons/partisipasi pelanggan ini berpotensi memberikan gambaran yang kurang optimal atas hasil survei, meskipun secara substansi pelayanan telah berjalan sesuai standar.

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menjadi catatan penting bagi BBSPJPPI untuk meningkatkan strategi pelaksanaan kegiatan, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pemantauan capaian indikator kinerja, agar pada triwulan berikutnya hambatan dan kendala serupa dapat diminimalisasi dan target yang ditetapkan dapat tercapai lebih optimal.

4.3 Saran dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas capaian maupun hambatan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025, BBSPJPPI perlu menetapkan langkah-langkah strategis yang terarah, baik dalam aspek kinerja keuangan maupun pencapaian output. Salah satu fokus utama adalah memperkuat koordinasi lintas kelompok dan tim kerja kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih sinkron, efisien, serta mampu mendorong percepatan penyelesaian kegiatan yang masih tertunda, khususnya yang berhubungan dengan realisasi anggaran. Upaya ini menjadi penting mengingat masih terdapat beberapa alokasi anggaran yang belum terimplementasi secara optimal akibat keterbatasan waktu maupun proses administrasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengukuran kinerja layanan, BBSPJPPI perlu memperhatikan tantangan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan *Net Promoter Score* (NPS), terutama rendahnya tingkat pengembalian kuesioner. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi intensif seperti melakukan *blasting* ulang kuesioner pada pertengahan bulan melalui nomor pemasaran, serta melakukan penyetingan sistem SINDIi agar pelanggan diwajibkan mengisi kuesioner sebelum dapat mengunduh Laporan Hasil Uji (LHU). Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah responden, sehingga hasil survei lebih representatif dan mampu mencerminkan kualitas pelayanan yang sebenarnya. Terkait penerimaan PNBP yang belum sepenuhnya optimal, diperlukan upaya peningkatan realisasi melalui beberapa langkah. Pertama, memperkuat monitoring terhadap proses penagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Kedua, mendorong realisasi layanan dari pengembangan jenis layanan baru seperti verifikasi TKDN, uji profisiensi, dan kalibrasi lingkungan. Ketiga, melakukan monitoring intensif terhadap penyelesaian piutang jasa layanan agar potensi penerimaan dapat segera masuk dan mendukung capaian target penerimaan tahunan.

LAPORAN PP.39 TRIWULAN III BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2025



Dalam konteks pengelolaan anggaran, BBSPJPPI perlu segera melakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan maupun pekerjaan belanja modal yang belum terlaksana, dengan memperhatikan ketersediaan sumber anggaran, khususnya yang bersumber dari PNBP BLU. Apabila diproyeksikan terdapat alokasi anggaran kegiatan yang sulit terealisasi hingga akhir tahun, langkah realokasi anggaran perlu segera dilakukan untuk mendukung kegiatan yang lebih membutuhkan tambahan alokasi. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran dapat lebih tepat sasaran serta mendukung optimalisasi kinerja organisasi. Sementara berkaitan dengan adanya potensi kekurangan belanja pegawai, maka perlu dilakukan koordinasi dengan Sekretariat BSKJI terkait pemenuhan kekurangan anggaran belanja pegawai melalui proses revisi anggaran sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan belanja pegawai satker BBSPJPPI tahun 2025 yang telah disampaikan.

Secara keseluruhan, BBSPJPPI harus menjaga keseimbangan antara kinerja keuangan dan kinerja output. Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari pencapaian output, fisik serta kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi triwulanan perlu lebih difokuskan pada aspek kecepatan pelaksanaan dan mutu hasil, sehingga terjadi keselarasan antara realisasi fisik dan realisasi anggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian kinerja BBSPJPPI pada Triwulan IV dapat meningkat secara signifikan, dan target tahunan tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.



LAMPIRAN

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025

Unit Organisasi : BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No. Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Rencana Ak	si				
			Target	Triwulan I Rencana Kegiatan	Target	Triwulan II Rencana Kegiatan	Target	Triwulan III Rencana Kegiatan	Target	Triwulan IV Rencana Kegiatan	Penanggung Jawab	Timeline
1 2 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan	3 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	4 3,68 indeks	5 25%	6 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I	7	8 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW	9 75%	10 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW III 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III	11 100%	12 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW IV 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV	13 Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa	19 Dec-25
jasa industri				3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilalan IKM (IPP dan IPAK) TW L		2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilalan IKM (IPP dan IPAK) TW II.		3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilalan IKM (IPP dan IPAK) TW IIII		3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV. 4] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan.	Industri (Dyah AF)	
	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	25%	1) Promosi dan publikasi jasa kayanan BSSPJPPI 1) Prembuatan penewanna dan kontrak kepiaman jasa layanan 3) Pembuatan penewanna dan kontrak kepiaman jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan tehsin ke industri sesual permintan yang disepakati 4) Menjalin konuntikasi elektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BSSPJPPI 3) Monitoring dan evaluasi capalian TWI		1]Promosi dan publikasi jasa layanan BSSPPPI 2] Pembutan penawann dan kortak kejisama jasa layanan 3] Pembetan jasa layanan teknis ke Industri sesual permintaan yang disepakat 4] Menjalai komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BSSPPPI 5] Monitoring dan evaluasi capalan TW II	75%	1)Promoti dan publikasi jasa layanan BBSPPPI 2) Pembuatan penwawan dan kontrak rekyasana jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan tehsin ke Industri sesual permintan yang disepakati 4) Menjalih nomulasi efektif dan berkalaytura kepada pelanggan untuk menjaga kasetiana pelanggan kepada BSSPIPPI 5) Monitoring dan evalusat capalan TW III	100%	Lipromoti dan publikasi jasa layanan BBSP/PPI Ji Pembuatan penwama dan kontrak reispama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan tehini ke Industri sesual permintaan yang disepakati 4) Menjihin komulasi elektif dan berlanjutan kepada pelanggan untuk menjagi ksecitaan pelanggan kepada BBSP/PPI 5) Monitoring dan evalusat capalan TW IV.	a	
Terwujudnya layanan jasi industri yang profesional	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesual Service Level Agreement (SLA)	88 Persen	25%	1. Melakukan review terhadap DPK itau permintan jisa layanan 2. Melakukan perwanta nehadap peralatan pengujan/ aliansai 3. Melakukan kegistan pengambilan sampel layanan jisa teknis TW I 4. Melakukan monitoning dan evalusa terhadap capaian SPAT WI I 5. Melakukan penjadwalan kegistan audit tepat waktu sesual kenginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakan		1. Melakukan reviewa terhadap SPK atau permintana jisal Inyama. Pakelakukan reviewa terhadap SPK atau permintana jisal Inyama. Pakelakukan kegiatan pengambilan sampel Iayanan jisa teknis TW III. 4. Melakukan monitoring dalan evaluasi terhadap capaian SPM TW II. 5. Melakukan poing dalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan. 6. Melakukan pengangan dalan monitoringi sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan.	75%	Melakukan review tehdudg SPK atau permintan jisa layanan Melakukan reviewatan tehdadi peratahan pengajian Alainzai Melakukan kegitatan pengambilan sampeli Jayanan jisa telahis TWI Melakukan melakutan pengambilan sampeli Jayanan jisa telahis TWI III. Melakukan melakutan pengambilan sampeli Jayanan jisa telahis TWI III. Melakukan pengambilan kegitan audit tepit waktu sesual kelnginan pelanggan Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrak untuk pengujian yang di subkontrak untuk pengujian yang di	100%	Melakukan review terhadagi SYK atau permintana jasa layanan Melakukan review terhadagi SYK atau permintana jasa layanan Melakukan kegistan pengambilan sampel Jayanan jasa teknis TW IV. Melakukan montrofi gan evalusa terhadagi capalan SPM TW IV. Melakukan penjadwalan kegistan audit tepat waktu sesual keinginan pelanggan Melakukan penjadwalan kegistan audit tepat waktu sesual keinginan pelanggan Melakukan penjadwalan kegistan audit tepat waktu sesual keinginan pelanggan jungan di subkontrakkan	Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholid S), Ketua Tim Kerja Standardisasi,Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri (M. Syarifudin Edy Nugroho)	Dec-25
	Nilai Net Promoter Score (NPS)	40	25%	Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I	50%	Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II.	75%	Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan	100%	Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW IV.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Dec-25
3 Terwujudnya layanan jasi industri yang mandiri	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71	25%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan Ja Pemberian jasa kayanan tetnis ke industri sesuai permintann yang disepakati Menjain komunikasi elektri dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BSBPJPPI. Monitoring dan Evaluasi Capalan TW I.	50%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPIPPI Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPIPPI Promosi dan pananaran dan kontrak kerjasama jasa layanan Jameherian jasi ayanan keknis ke industri sesuai permintaan yang disepakat Ja Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPIPPI Jameherian dan Pelanggan Kepada BBSPIPPI Jameherian dan Kepada BBSPIPPI	75%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI Prembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan Ja Pemberian jasa layanan teksi sike industri sesuia permintaan yang disepakati 41 Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetaan pelanggan kepada BSPJPPI 51 Monitoring dan Evaluasi Capalan TW III.	100%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPIPPI Prembustan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan Ji Pemberian jasi kyanan tetnis ke industri sesaal permintaan yang disepakati di Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjagi kesetianan pedangan kepada BSSPIPI SJ Monitoring dan Evalussi Capalan TW IV.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Dec-25
	2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500 Hasil Layanan	25%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPPPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa Jayanan tetnis ke industri sesua permintan yang disepakati 4) Menjahi komunikasi efektri dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPPPP 5) Monitoring dan Evaluasi Capalan TW I.	50%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPPPI Pembutatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan Ji Pemberian jasi layanan ketinsi ke indiri sesuai permintiaan yang disepaksi Ji Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPIPPI Ji Monitoring dan Evalusai Capaian TW II.	75%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSP/PPI Prembustan penawara dan kontrak kerjasama jasa layanan Ja Pemberian jasa layanan tensi ke industri sesua permintaan yang disepakati Ja Pemberian jasa layanan tensi ke industri sesua permintaan yang disepakati Ji Menjalin komunikasi efektif dan berielanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetaan pelanggan kepada BSP/PII SJ Monitoring dan Evalusif Capalan TW III.	100%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI Pembuatan penawara dan kontrak kerjasama jasa layanan Ji Pembrain jasi layanan tehsi ke hudistri sesala permintaan yang disepakati di Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjagi kesetiaan pelangan kepada BSPJPPI SJ Monitoring dan Evalusci Capalan TW IV.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) a	Dec-25
	3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50 Persen	25%	Melakukan monitoring penerimaan BLU Melakukan inventarisasi saet yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	50%	Melakukan monitoring penerimaan BLU Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	75%	Melakukan monitoring penerimaan BLU Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	100%	Melakukan monitoring penerimaan BLU Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam)	Dec-25
	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,22 Persen	25%	Melakukan monitoring penerimaan BLU Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	50%	Melakukan monitoring penerimaan BLU Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	75%	Melakukan monitoring penerimaan BLU Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	100%	Melakukan monitoring penerimaan BLU Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam)	Dec-25
4 Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 indeks	25%	Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 PFL dan diklat struktural Pelaksanaan workshop/ Bimeks/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk sekuruh pegawai Rengemensi untuk sekuruh pegawai Rengempulan bukit peningkatan kompetensi SDM berkala Revaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.	50%	Noordinasi dan penyusunan rencana dikiat teknis 20 JPL dan dikiat struktural Jelekasnaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawal Jengumpulan bukt peningkatan kompetensi SDM berkala Jevaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.	75%	Noordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 21 Pelaksanan worshop/ Birntel/Jernina/webira untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai Sukompetensi untuk seluruh pegawai 31 Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 41 Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW III.	100%	Noordinasi dan penyusunan rencana dikiat teknis 20 JPL dan dikiat struktural 2) Pekiaksanan workshop/ Birnekl/seminar/webhar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk selumt pegawai 3) Pengumpulan bukit peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM V.	Ketua Kelompok Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Agung B)	Dec-25
5 Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dar pelayanan publik	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	25%	Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKII		Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKII. Pengembangan Sistem informasi Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	75%	1] Uji Coba Integrasi Sistem 2] Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Sistem 3] Evaluasi dan Perbaikan Sistem	100%	1] Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem2] Penyempurnaan Sistem Berdasarkan i	Ek Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Dec-25
	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80 Persen	25%	I) Pemetaan selumi hinfastruktur yang sudah ada dalam pementatahan berbasis elektronik dan layanan pulik yang daput dinitergeriskan. I) Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat kerac dan lunak yang diperlukan. I) Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap inpilementais		Mulai pengembangan dan penyesualan sistem SPBE disesualkan dengan kesiapan semua bidang Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	75%	1] Mulai pengembangan dan penyesualan sistem SPBE disesualkan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	100%	1] Mulai pengembangan dan penyesualan sistem SPBE disesualkan dengan kesipana semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas		
	3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 indeks	30%	1) Mengevalussi/merviu nital iPP Tahun sebelumnya. 2) Perencanan pengembangan/penunskinan SINDil. 3) Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala. 4) Pemutahiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diskes oleh maysarakat tanga panguan 5) Update dan upbad informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6) Penyebaran informasi kapasitasi layanan Balai melalui media Kemenperin		Il Pengembangan/ pemutahkina SNOII. 2 (Juptate webira perutah keriala 3 (Juptate Medicos secara berkala 3 (Juptate Medicos secara berkala 4) (Pentutakhira sitem informasi digitar terintegrasi secara berkala 4) Pentutakhira sitem informasi pentutakhira secara berkala 4) Pentutakhira sitem informasi pentutakhira secara berkala 4) Pentutakhira sitem informasi pentutakhira secara berkala 4) 4) Pentutakhira sitem informasi pentutakhira secara berkala 4) 4) Pentutakhira sitem informasi pentutakhira secara berkala 4) 4) Pentutakhira sitem informasi digitar secara berkala 4) 4) Pentutakhira sitem informasi digitar secara berkala 4) 4) Pentutakhira sitem informasi digitar terintegrasi secara berkala 4) 4) Pentutakhira sitem informasi digitar terintegrasi sitem	75%	1) Pengembangan/ pemutahkiran SMDIL: 2) Updaté webise cerara berkala 3) Updaté Medios secara berkala dan setiap sait 4) Updaté Medios secara berkala dan setiap sait 4) Pemutahkiran sikim informasi digital terindergasi secara berkala memuat informasi ya mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layaran publik yang tersaji pada desk layanan publik 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASI	100%	1) Update webute secara berkala 2) Update Medos secara berkala dan estap saat 3) Pemuskahiran sistmi informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi ig mudali dakses oleh masyayarakat 4) Penyedulan informasi layanan publik yang tersaji pada desi layanan publik 5) Self asseemen Sandart pelayanan publik untuk mengukur capalan nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan		
6 Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50 Persen	15%	Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	40%	1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	85%	1) Penyigsan dokumen kelengiapan pelaksanaan audit kinerja 2) Koordinasi dan fasiliksia pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen 3) Penyusunan dan penyampalan rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan 4) Koordinasi penyiapan dan penyampalan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5) Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	100%	Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesalan hasil pengawasan	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	Dec-25
	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91,84	25%	Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I. Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.		Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II. Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan	75%	Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III. Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta.	100%	Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV. Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta. Tindak lanjut hasil evaluasi penlialan	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto)	Dec-25

o. Sasaran Kegletan	Indikator Kinerja	Target					Rencana Al			Telustian IV	Penanggung Jawab	Timeline
. Sasaran Kegiatan				Triwulan i		Triwulan II		Triwulan III		11111111111	- Penniggung Jawan	tusente
			Targe	t Rencana Kegletan	Target	Rencana Keglatan	Target	Rencena Keglatan	Target	Rencana Keglatan	Ketua Kelompok keria	Dec-25
7 Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82	30%	1) Penyusunan dokumen Papihi 2) Penyusunan dokumen Rendin 3) Pelaksanaan monev kineja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP-39 Twi) 4) Penyispan data dukung penjalaian SAKIP sesual Permenpan RB 88/2021 5) Koordinan pelaksanaan penjalaian SAKIP dengan Ses BSKII dan Tim Itje	60%	Pelakarnaan monev kinerja dan pervusuran dokumen akauntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) ZiPenyilapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	80%	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III)	100%	1) Pelakamaan monev kinerja dan penyasunan dokumen akuntabilikas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Program (Kukuh Aryo W)	Uec-25
	Nilai minimai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	94	25%	1) Membut renzan pensikan dana bulanan triwulan i dan melakukan revisi pemutakhiran SOO Helaman i IDIPA. 2) Melakutan monitoring dan evalusel pelakusanan resitsati belanja. 3) Pengajuan SNM begra watus sarah keransun TVI. 4) Penyampalan data perjaijan/kontrier, dan penyelesalan tagihan SPM LS Kontaktual yang didaflarkan dany disipkan ke KPPM scara tagat waktu. 5) Pelaporan capalan output secara britaka dan tagat waktu.	50%	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II den metakukan revisi penutakhiran RPO Hamanu III DIPA 2) Mekakukan monitoring dan esuluasi pelaksanaan rasikasi belania 3) Rencocritoriad eterapa PPK terkalt rencana pelaksanaan kegiatan di lisp trimuna gara pelaksanaan kegiatan sesual dengan jadwal yang telah direncanakan	75%	1) Membusit rencara penaritan dana bulanan trivulan III dan melakukan revisi pemutahihina 190 kalaman III (1904) pelakaran III (1904) pelakaran III (1904) pelakaran III (1904) pelakaran ilahan pelakaran realisasi belanja 3) Bertocordinasi dangan PRX terkati rencara pelakasanan kegistan di Ilso trivulan 4) Memastitan agar pelaksanaan kegistan sesual dengan jadwal yang telah direncanakan	100%	1) Membular rencara penarikan dana bulanan trivuluan III dan melakukan nerisi pemutabihiran Polisaham III (1974). 2) Melakukan monitoring dan erailusai pelakananan realisas belanja. 3) Bentocordinasi dangan PPK terkait rencaran pelakananan kepistan di laip trivulan 4) Memastikan agar pelakananan kepistan di sentangan pelakananan kepistan di sentangan pelakananan kepistan di sentangan pelakananan kepistan sesuai dengan jadwai yang telah direncarakan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)	
Meningkatnya penggunaan produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah	53 Persen	30%	I Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegistan pengadaan baranglisas dalam CIPA tahun berjalan (2) Pengisian ajitasi PSON (2) Pengisian pangisian pengeberih dari Impor atau TKDIK ol bawah 25% (4) Mengutamakan pembelaian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Permeriksaan barangbarang PCIKO pada webutar PSON sebelum melaksian pembelain/pengadaan (5) Mekatukan tagging resilisasi TKDIK atas resilisasi belanja pada apilitasi e-Mon APBN (6) Retaphibiasi resilisasi penganaan produk dalam negeri berdasafkan tagging PON dalam apilitasi e-Mon APBN (6)	50%	Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jaswi pelakaranan pengadaan dan nencana perantian dana yang dahah Sisusum. Mengatanakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Permenticaan barang-barang beri (TON) pada sebalite PSDN sebelum melakukan pembelian/pengadaan Webelum melakukan pembelian/pengadaan Si Metakukan tagain genilalari (TON kater serilakai belani) pada aptikasi e-Mon APBN APBN sebaluhasi ang realisasi END serilakai belanip pada aptikasi e-Mon APBN APBN sepabbasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	75%	1) Mengutarnakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemerikasah barrap-barrap bert KON pada webite P30N sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKON atas melasai belanja nada apilikasi e-KON APBN 3) Rebapitulisal realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	100%	1) Mengutumakan pembelian produk dalam negeri dalam prose pergadaan. Pemeriksaan barang-barang ber/KDK) pada website PSON sebelum melakukan pembelin/pengadaan 2) Melakukan tagging realissal TKON ataar realissal belanja pada aplikasiMon APBN 3) Rekapitutasi realissal penggutumah Droduk, dalam negeri berdasarkan tagging	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto).	Dec-25

Semarang, Januari 2025

A lepat rab Pippi

Dr. Sidik Herman

REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN III TA. 2025

SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	0/- T	Fisik	Sampai Triwulan k	II egiatan	Kendala	Tindak Lanjut	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
140.	r ujuan/ Sasar an	Tujuan/Sasaran	rarget	Keansasi	Capaian		Realisasi		Realisasi	Kenuara	I maak Eanjut	Tindak Lanjut	r enanggung jawab
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	(IKM)*	3,68	3,7	100,54	75	75	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW III 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW III	B7-B9 : Penyebaran keusioner ke palanggan dengan jumlah kuesioner yang kembali sampai TW III sebanyak 204 buah dengan nilai 3,70.	Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey IKM.	Perlu dilakukan berbagai strategi urtuk menarik minat pelanggan supaya mengisi kuesioner sehingga kuesioner yang di share diberikan feedback yang kembali ke BBSPJPPI seperti: menargetkan pelanggan yang datang ke BBSPJPPI untuk langsung mengisi form kuesioner; melakukan blasting wa dan email secara lebih intens dan terjadwal, komunikasi efektif, serta sosaliasai melalui media sosial BBSPJPPI. Selain itu, pemanfaatan platform SINDII bisa digunakan sebagai sarana pelanggan untuk mengisi kuesioner sebelum mengunduh laporan hasil. Untuk pelanggan sertifikasi, kuesioner dapat diberikan sebelum sertifikat SPPT SNI, Sertifikat ISO 9010, Sertifikat industri Hijau, Sertifikat ISO 14001 diserahkan kepada pelanggan.	Desember 2025	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)
		Junlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	762 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	79,38	75	75	1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 13] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efekti dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW III	sampai TW III sebanyak 762 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi.	1. Adanya kompetensi dari kompettori dengan layanan yang sejenis dengan harga lebit murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Venfikasi TXON, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan	Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemerikasan hala) gar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di	Desember 2025	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88 Persen	92,97 Persen	105,65	75	75	Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW III Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW III.	B7 : Jumlah order Bulan Juli sebesar 832 order dengan order yg sesuai SPM 708 order. B8 : Jumlah order Bulan Agustus sebesar 698 order dengan order yg sesuai SPM 678 order. B9 : Jumlah order September sebesar 579 order dengan order yg sesuai SPM 577 order.			Desember 2025	Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholid S), Ketua Tim Kerja Standardisasi,Sertifi kasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri (M. Syarifudin Edy Nugroho),Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	40 Nilai	62,25 Nilai	155,63	75	75	Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan Serialuasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW III	B7 – B9: jumlah responden sampai September 204 responden dengan promotor 135 responden, passives 61 pelanggan dan detractors 8 pelanggan	Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey IKM.	Perlu dilakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi kuesioner sehingga kuesioner yang di share diberikan feedback yang kembali ke BBSPJPPI seperti: menargetkan pelanggan yang datang ke BBSPJPPI untuk langsung	Desember 2025	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71%	21,02%	75,86	75	75	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BRSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesual permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efekti dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BRSPJPPI. 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.	Penerimaan sampai Bulan Juli 2025 sebesar Rp. 10.391.371.008, B8: Penerimaan sampai bulan Agustus 2025 sebesar Rp. 11.536.178.976, B9: Penerimaan PNBP BBSPJPPI	murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berhagai layanan baru seperti	Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi Menguethas hemampuan layanan melalui kerjasama subkon Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemerikasan hala) gar tertarii untuk melakukan proses TKDN dan halal di	Desember 2025	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)

	T							Sampai Triwulan I	ı	T	<u> </u>		
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	% F	isik Realisasi	Ke	egiatan	Kendala	Tindak Lanjut	Jangka Waktu Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	Realisasi 8	Rencana 9	Realisasi 10	11	12	13	14
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7500 Hasil Layanan	6164 Hasil Layanan	82,19	75	75	11 Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 21 Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 31 Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 41 Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 51 Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	Jumlah layanan jasa industri sampai Juli 2025 sebesar 4580 hasil layanan. B8: Jumlah layanan jasa industri sampai Agustus 2025 sebesar 5277 hasil layanan. B9: Jumlah layanan jasa industri sampai September 2025 sebesar 6164 hasil layanan	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AIMS tetapi belum didapatkan hasali jumlah pelanggan sesuai harapan	yang terakreditasi 3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon 4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi 5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di	Desember 2025	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50%	11,62%	80,14	75	75	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	B7-B9: 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU Juli - September 2025 2. melakukan pengesahan penerimaan Juli-September 2025. 3. Updating nilai buku asset satuan kerja. Dimana Penerimaan Rp 14870.290.922,- sedangkan asset tetap Rp.127.976.236.314	Penerimaan BLU di bulan Juli- Agustus masih di bawah target rata-rata bulanan	melakukan penagihan piutang segera melakukan penagihan terhadap pekerjaan yang sudah selesai segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM	Desember 2025	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF), Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam)
		Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,22%	71,71%	132,26	75	75	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	B7-B9: I.Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan Juli- September 2025. Z.Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU Juli- September 2025. Dimana pendapatan operasional Rp.14.870.290.922 sedangkan belanja operasional Rp.20.737.316.569	Peneriman BLU di bulan Juli- Agustus masih di bawah target rata-rata bulanan	melakukan penagihan piutang segera melakukan penagihan terhadap pekerjaan yang sudah selesai segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM	Desember 2025	Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam)
4	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 indeks	81,41 indeks	100,14	75	75	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 PL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW III.	B7-B9: 1.Monitoring kesesuaian usulan rencana pelatihan 2025 TW III. 2. Fasilitasi diklat /pelatihan peningkatan kompetensi pegawai BSSPIPI. 3. pengumpulan bukti sertifikat pelatihan peningkatan kompetensi sampai TW III. 4. Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM sampai TW III.	I) Pelatihan Kepemimpinan Menunggu penugsan dari BSKJI 2] Perubahan Kebijakan Penerapan Diklat Fungsional di masing-masing unit pembina termasuk penjadwalan 3] Efisiensi Anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM diprioritaskan via Daring 4] Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan	Il Koordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2025 2] Monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar 3] Koordinasi lebih lanjut terkait Pelatihan Kepemimpinan dengan BSKII 4] Mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Terkis 20 IPJL/ Workshoy BimTek/ Sosilassi 5] Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat 6] Mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai	Desember 2025	Ketua Kelompok kerja Kepegawaian (Agung B)
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20%	19%	95	75	75	1] Uji Coba Integrasi Sistem 2] Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Sistem. 3] Evaluasi dan Perbaikan Sistem	B7: Ujicoba integrasi sistem. B8: Sosialisasi dan pelatihan pengguna untuk konfigurasi API. B9: Evaluasi dan perbaikan.	Belum adanya update manual dan sistem padai SIPPT BSKII yang dapat memberikan umpan balik jika terjadi kegagalan pengiriman dari SINDI sehingga mengakibatkan selisih data perhitungan layanan pengujian dan kalibrasi	Melakukan konsultasi dengan admin SIPPT BSKII melalui forum grup integrasi data BSIKI agar dapat memberikan solusi untuk pengiriman data yang tertunda atau tidak dapat di terima pada sisi server SIPPT.	Desember 2025	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)
		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80%	65,75%	82,19	75	75	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang. 2] Melakukan ujicoba implementasi sistem SPBE secara terbatas.	B7-B9: -Melakukan implementasi sistem SPBE -Mengumpulkan bukti dukung implementasi SPBE.	Pemenuhan bukti dukung dalam pengisian LKE SPBE belum ada panduan baku berupa juknis yang memudahkan dalam penyusunan bukti dukung implementasi SPBE	Melakukan diskusi, bimbingan serta mengikuti kegiatan yang terkait SPBE dengan Pusdatin dalam rangka memahami pemenuhan bukti dukung pada pengisisn LKE.	Desember 2025	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)

		Indikator Kinerja						Sampai Triwulan l				Jangka Waktu	
No.	Tujuan/Sasaran	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian		isik Realisasi		egiatan Realisasi	Kendala	Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	2	3 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4 4,62	5	6	7 75	8 75	9 1 Pengembangan/ pemutakhiran SINDIII. 2] Update website secara berkala 3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS	10 B7-B9: 1.meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya. 2.update website, medsos, konten SIPPN dan semua media BBSPJPPI. 3.mengikuti pameran 3rd POMI, AIGISA 40 conference & Expo 2025, dan Halal Expo.	11 Saat ini telah diupayakan penyebaran kuesioner yang kembali ke BBSPJPPI melalui pengisian di sindii sebelum unduh HUI mandiri. Akan tetapi, masih terddapat kendala tekhis sehingga belum bisa diterapkan	12 Dilakukan pembenahan modul di SINDII	13 Desember 2025	14 Ketua Tim Pengelol dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50%	-		85	85	1) Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja. 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen. 3) Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan. 4) Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan. 5) Koordinasi dengan Tim Auditor Irjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.	B7-B9: LPenyiapan data dan dokumen keperluan audit yang dibutuhkan pada pelaksanaan audit kinerja sesuai dafara dalam ND Inspektur III Nomor 151/IJ-IINO A/PW/IVI/2025. 2.Fasilitasi pelaksanaan audit kinerja oleh Tim Auditor Inspektorat pada 14-18 Juli 2025. 3.Penyusunan Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Satker BBSPJPPI. 4.Koordinasi tindak lanjut penyelesaian hasil pengawasan dengan masing-masing penanggung jawab tindak lanjut.	1] Masih terdapat beberapa tindak lanjut yang belum sesuai rekomendas, antara lain: a. Perbaikan laporan kegiatan Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi tahun 2024 b. Partisipasi personil SPI BLU pada diklat/ pelatihan yang berkaitan dengan peinigkatan kompetensi terkait audit/pengawasan di bidang keuangan/akuntansi c. Penyelesalan piutang jasa layanan an PT. Tekstil Industri Palekat	1] Koordinasi dengan masing-masing Penanggung Jawab untuk menindaklanjuti hasil temuan sesuai rekomendasi 2] Monitoring penyelesaian tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi 3] Penyampaian dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada satker BBSPJPPI dengan pihak inspektorat Jenderal sesuai batas waktu yang ditetapkan	Desember 2025	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)
		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan	91,84 Nilai	-		75	75	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III. 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta	B7-B9: 1] Pengendalian naskah dinas,penggunaan arsip,pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip Bulan Julis d Bulan September. 2] Pemenuhan data dukung dan verifikasi lapangan pengawasan kearsipan internal TA 2024 3] Pelaksanaan verifikasi lapangan pengawasan kearsipan internal oleh Biro umum tanggal 17 September 2025.	1) Terdapat catatan dari pengawasan kearsiapan internal Kementerian Perindustrian. 2) Anggaran yang terbatas untuk peningkatan kapabilitas SDM kearsipan. 3) Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk di Srikandi agak terlambat.	Menindaklanjuti catatan dari pengawasan kearsiapan internal Kementerian Perindustrian. Mengusulkan penambahan anggaran dan mengikutsertakan BIMTEK untuk SDM yang terkait kearsipan. Melaporkan ke Biro Umum sebagai UK	Desember 2025	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto)
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82 Nilai	83,6 Nilai	101,95	80	80	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III)	B7-B9: 1. Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin Juli sd September 2025 2. Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin Bulan Juli sd September 2025. 3. Pengisian dan Updating data capaian kinerja Juli sd September 2025.	(-)	Penyampaian Laporan PP 39 Tw III 2025 sebelum batas waktu yang ditentukan	Desember 2025	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran IKPA	94 Nilai	100 Nilai	106,38	75	75	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW III		1] Belum terdapat kejelasan pengajuan dan persetujuan usulan relaksasi blokir kode A tahap III yang akan dikoordinir Set BSKJI	1] Koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI terkait penyesuaian data Rencana Penarikan Dana (RPD) sd Triwulan IV 2025 2) Penyampaian usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw IV 2025 ke Kamwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng sebelum batas waktu yang ditentukan 3) Menginput realisasi capaian output	Desember 2025	Ketua Kelompok Kerja Reuangan (Misbakhul Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)

		Indikator Kinerja		T		CONTROL OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS		Sampai Triwulan I				Jangka Waktu	
No.	Tujuan/Sasaran	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	% F	isik	K	giatan	Kendala	Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
		i ujuan/Sasai an				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah	53%	54,12%	102,11	75		1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan palisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi SAKTI (dikarenakan emon masih proses pembaharuan) 3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging.	B7-B9 : 1.Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. 2.Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI. 3TKDN sampai TW III di sesuai akun terpilih sebesar 54,12 %	1] Keterbatasan belanja bahan Kimla laboratorium yang didapatkan dari produsen lokal. 2] Keterbatasan belanja mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari industri dalam negeri. 3] Ollakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilal TKDN.	Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatikan izin dari Menperin/Sekjend. Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalul website P4DN.	Desember 2025	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto),Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam).
				1						18 415	OLIK IN TAKE		

Semarang Oktober 2025
A Kapala Bi BPJPPI

Dr Sidik Herman

TRIWULAN III

2025

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN



Kementerian PPN/ Bappenas MONEY

#247161

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN III (KUMULATIF)

Tahun : 2025

K/L : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UK. Eselon I:07 - Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri

	NOMENKELATUR		FISIK			ANGGARAN		STA	TUS PELAKSANAAN		FISIK	Status	PERMA:	SALAHAN
NO	KOMPONEN	Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres	Riil	Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
	2.EBA.958 - Layanan Hubungan _Y arakat dan Informasi	Layanan	1	0	333,528,000	29,137,500	8.74%							
1	051 Pengelolaan Data dan Informasi		1	1	333,528,000	29,137,500	8.74%	Pelaksanaan	pengelolaan data dan informasi Bulan September 2025	80.00		Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah
6042	2.EBA.962 - Layanan Umum	Layanan	1	0	73,958,000	8,968,797	12.13%							
2	051 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Layanan	1	1	73,958,000	8,968,797	12.13%	Pelaksanaan	Layanan Tata Usaha Bulan September 2025	59.00		Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah
	2.EBA.994 - Layanan antoran	Layanan	1	0	20,664,658,000	16,411,901,823	79.42%							
3	001 Gaji dan Tunjangan		1	9	14,982,432,000	13,548,735,271	90.43%	Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjangan Bulan September 2025	89.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah
4	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1	7	5,682,226,000	2,863,166,552	50.39%	Pelaksanaan	Pemeliharaan dan operasional perkantoran September 2025	79.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah
6042 Inter	2.EBB.951 - Layanan Sarana nal	Unit	90	39	674,826,000	196,905,876	29.18%							

	NOMENKELATUR	ı	FISIK			ANGGARAN		STA	TUS PELAKSANAAN		FISIK	Status	PERMAS	ALAHAN
NO	KOMPONEN	Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres	Riil	Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
5	052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		29	24	298,266,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Persiapan pengadaan spesifikasi barang	89.00		Sudah	Barang / Material	Tidak ada masalah
6	053 Pengadaan peralatan inventaris perkantoran		61	15	341,560,000	196,905,876	57.65%	Pelaksanaan	SPJan pengadaan barang dan persiapan tender	85.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
7	051 Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional		1	0	35,000,000	0	0.00%	Persiapan	anggaran diblokir sehingga tidak dilaksanakan	25.00		Belum	Anggaran	Tidak ada anggarannya
6042 Inter	2.EBB.971 - Layanan Prasarana mal	Unit	1	0	800,000,000	0	0.00%							
8	051 Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		1	0	800,000,000	0	0.00%	Persiapan	anggaran renovasi diblokir	25.00		Belum	Anggaran	anggaran renovasi gedung diblokir terkait efisiensi anggaran
604 2	2.EBC.954 - Layanan Manajemen	Orang	107	81	256,252,000	1,200,000	0.47%							
9	051 Pengelolaan/Manajemen SDM		107	81	256,252,000	1,200,000	0.47%	Pelaksanaan	pengelolaan manajemen SDM Bulan September 2025	89.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
	2.EBC.996 - Layanan Pendidikan Pelatihan	Orang	55	54	444,272,000	169,700,772	38.20%							
10	051 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM		55	54	444,272,000	169,700,772	38.20%	Pelaksanaan	fasilitasi pengembangan kompetensi Bulan September 2025	89.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
	2.EBD.952 - Layanan ncanaan dan Penganggaran	Dokumen	2	1	45,906,000	0	0.00%							

	NOMENKELATUR		FISIK			ANGGARAN		STA	TUS PELAKSANAAN		FISIK	Status	PERMAS	ALAHAN
NO	KOMPONEN	Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres	Riil	Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
11	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		2	1	45,906,000	0	0.00%	Pelaksanaan	revisi ke 10 , reviu rkakl TA 2026	75.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
	2.EBD.953 - Layanan antauan dan Evaluasi	Dokumen	2	1	44,061,000	301,500	0.68%							
12	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		2	1	44,061,000	301,500	0.68%	Pelaksanaan	pembuatan draft laporan PP 39 TW III TA 2025	75.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
	2.EBD.955 - Layanan ajemen Keuangan	Dokumen	2	1	129,620,000	91,245,418	70.39%							
13	051 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		2	1	129,620,000	91,245,418	70.39%	Pelaksanaan	pengerjaan laporan keuangan TW III TA 2025	75.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
604 2 Kine	2.EBD.961 - Layanan Reformasi rja	Dokumen	2	0	32,144,000	602,399	1.87%							
14	051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP		2	0	32,144,000	602,399	1.87%	Pelaksanaan	update nilai IKM sampai Bulan september, dengan capaian IKM 3,70	65.00		Belum	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
Dise	7.AEF.013 - Sosialisasi dan minasi Layanan Teknis cegahan Pencemaran Industri	orang	150	0	557,212,000	38,683,420	6.94%							
15	051 Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	orang	150	0	285,484,000	0	0.00%	Persiapan	persiapan pelaksanaan BG triwulan IV	25.00		Belum	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
16	052 Publikasi Layanan Jasa Teknis	Kegiatan	1	6	271,728,000	38,683,420	14.24%	Pelaksanaan	pelaksanaan pameran halal	84.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
tekn	7.BAD.002 - Jasa pelayanan iis pengujian Pencegahan cemaran Industri	Industri	480	326	6,390,307,000	4,208,609,860	65.86%							

	NOMENKELATUR	ı	FISIK			ANGGARAN		STA	TUS PELAKSANAAN		FISIK	Status	PERMAS	SALAHAN
NO	KOMPONEN	Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres	Riil	Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
17	051 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	Industri	480	326	6,200,577,000	4,208,609,860	67.87%	Pelaksanaan	Layanan jasa pengujian bulan september	89.00		Sudah	Barang / Material	Tidak ada masalah
18	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	Akreditasi	1	0	189,730,000	0	0.00%	Persiapan	persiapan surveilen akreditasi lab	25.00		Belum	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
tekn	7.BAD.022 - Jasa pelayanan is kalibrasi Pencegahan cemaran Industri	Industri	30	29	524,236,000	133,320,031	25.43%							
19	051 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	Industri	30	29	462,920,000	133,320,031	28.80%	Pelaksanaan	Layanan jasa kalibrasi bulan september	92.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
20	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	Akreditasi	1	0	61,316,000	0	0.00%	Persiapan	persiapan akreditasi lab kalibrasi	25.00		Belum	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
tekn	7.BAD.034 - Jasa pelayanan is sertifikasi Pencegahan cemaran Industri	Industri	240	197	977,228,000	318,688,672	32.61%							
21	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi	Akreditasi	1	1	262,528,000	25,500,000	9.71%	Pelaksanaan	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi	91.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
22	051 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	Industri	240	197	714,700,000	293,188,672	41.02%	Pelaksanaan	layanan jasa sertifikasi Bulan September 2025	85.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
bimb	7.BAD.055 - Jasa pelayanan bingan dan pendampingan teknis stri Pencegahan Pencemaran stri	Industri	5	4	217,110,000	51,214,618	23.59%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK	Status	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres	Riil	Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
23	051 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	industri	5	5	217,110,000	51,214,618	23.59%	Pelaksanaan	promosi bimtek bulan september	84.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	tidak ada masalah
6077.BAD.056 - Jasa pelayanan inspeksi teknis dan verifikasi industri Pencegahan Pencemaran Industri		Industri	10	9	28,668,000	20,212,000	70.50%							
24	051 Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	Industri	10	9	28,668,000	20,212,000	70.50%	Pelaksanaan	layanan inspeksi dan verifikasi teknis september	89.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
pem	7.BAD.057 - Jasa optimalisasi anfaatan teknologi industri cegahan Pencemaran Industri	Industri	18	5	462,382,000	147,050,047	31.80%							
25	051 Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	Industri	4	3	367,080,000	147,050,047	40.06%	Pelaksanaan	layanan konsultansi optek september	87.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
26	052 Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	Industri	4	2	95,302,000	0	0.00%	Pelaksanaan	layanan kolaborasi optek september 2025	90.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
6077.BAD.096 - Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri		Industri	15	10	155,668,000	30,132,875	19.36%							
27	051 Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi	Industri	15	10	112,000,000	28,632,875	25.57%	Pelaksanaan	layanan uji profisiensi september 2025	50.00		Sudah	Barang / Material	Tidak ada masalah
28	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	Akreditasi	1	1	43,668,000	1,500,000	3.44%	Pelaksanaan	akreditasi PUP sudah terbit	96.00		Sudah	Barang / Material	Tidak ada masalah
labo	7.CAH.013 - Peralatan fasilitas ratorium/workshop/layanan cegahan Pencemaran Industri	Unit	38	4	3,347,095,000	1,436,725,238	42.92%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK	Status	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres	Riil	Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
29	051 Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	Unit	38	4	3,347,095,000	1,436,725,238	42.92%	Pelaksanaan	proses perencanaan pengadaan alat	80.00		Sudah	Barang / Material	Tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,

Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

Dr Sidik Herman





2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas

